

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA
(Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman
Periode Tahun 2016–2020)**



Disusun Oleh:

Rizky Awalumudin Al Ikhsan

022116157

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN**

2020

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA (Pada
Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Periode
Tahun 2016–2020)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA,
CCSA, CA, CSEP, QIA)



[Handwritten signature]

LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SIDANG SKRIPSI

Kami selaku Ketua Komisi dan Anggota Komisi telah melakukan bimbingan skripsi mulai tanggal: / / dan berakhir tanggal: / /

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : Rizky Awalumudin Al Ikhsan (L)*
NPM : 022116157
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah : Perpajakan
Ketua Komisi : Joko Supriyanto, Ak.,M.Ak.,CA.
Anggota Komisi : Wiwik Budianti., S.E.,M.Si,
Judul Skripsi : Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Periode Tahun 2016–2020)

Menyetujui bahwa nama tersebut di atas dapat disertakan mengikuti ujian sidang skripsi yang dilaksanakan oleh pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Menyetujui,

Ketua Komisi Pembimbing
(Joko Supriyanto,Ak.,M.Ak.,CA.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Wiwik Budianti., S.E.,M.Si)



Diketahui,

Ketua Program Studi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak.,MBA,
CMA.,CCSA.,CA.,CSEP., QIA.)



**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA
(Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman
Periode Tahun 2016–2020)**

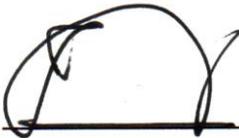
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: kamis, Tanggal: 9 Februari 2023

Rizky Awalumudin Al Ikhsan
022116157

Disetujui

Ketua Penguji Sidang
(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak, MM, CA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Joko supriyanto, Ak., M. Ak., CA.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Wiwik Budianti., S.E., M.Si)



PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Awalumudin Al Ikhsan
NPM : 022116157
Judul Skripsi : Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode Tahun 2016–2020)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 9 Februari 2023



Rizky Awalumudin Al Ikhsan

022116157

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

Rizky Awalumudin Al. 022116157. Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode Tahun 2016–2020. Di bawah bimbingan: JOKO SUPRIYANTO dan WIWIK BUDIANTI. 2022.

Tujuan dari penelitian ini 1) Untuk menjelaskan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2) Untuk menjelaskan pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 3) Untuk menjelaskan pengaruh *Good Corporate Governance* dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian mengenai *Good Corporate Governance*, perencanaan pajak dan manajemen laba yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Subjek dalam penelitian ini yaitu perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020. Jumlah sampel yang dilakukan dalam penelitian ini sebanyak 12 perusahaan menggunakan metode penarikan sampel dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 1) Hasil pengujian dapat dibuktikan bahwa hipotesis pertama ditolak dengan hasil penelitian bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, 2) Hasil pengujian dapat dibuktikan bahwa hipotesis kedua diterima dengan hasil penelitian bahwa komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba, 3) Hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba, 4) Komisaris Independen (X_1), komite audit (X_2) dan perencanaan pajak (X_3), secara bersama-sama berpengaruh terhadap dan manajemen laba (Y).

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba

PRAKATA

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris terhadap Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)”. Proposal Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

Penulis menyadari dalam pembuatan proposal penelitian ini mendapatkan dukungan dan bantuan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Orang tua penulis, Ibu Suarsih dan Bapak Usup Suwardi yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis, sehingga dalam penyusunan skripsi berjalan dengan lancar.
2. Adnan Musthafa Al Amin selaku adik dari penulis yang selalu memberikan semangat dan hiburan kepada penulis.
3. Yunita Susanti selaku saudara dari penulis yang selalu memberikan semangat dan membantu kepada penulis selama dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Bapak Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CFrA., CA Selaku Ketua Komisi Pembimbing penulis yang telah banyak membimbing dan memberikan banyak saran dan dengan penuh kesabarannya mengarahkan penulisan skripsi penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Ibu Wiwik Budianti., S.E., Msi Selaku Anggota Komisi Pembimbing penulis yang telah banyak membantu, membimbing, mendidik, menasehati, mengarahkan dan memberikan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi penelitian ini
8. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
9. Teman-teman Grup Vocal (Rizal Irwansyah, Gazian Sidqi, Reza G.C, M.Raynata, Rizky F, Hilman Nawawi).
10. Teman-teman Kosan yang luar biasa (Riki, Akbar, Lana, Aldi, Dhimas, Yuda, Ivan, Nursan dan masih banyak yang lainnya).
11. Kepada seluruh teman-teman kelas E Akuntansi angkatan 2016 dan teman-teman jurusan Akuntansi Perpajakan atas kebersamaan dan dukungan selama menjadi mahasiswa Akuntansi Universitas Pakuan Bogor.

12. Teman-teman seperjuangan bimbingan Bapak Joko dan Ibu Wiwik yang mau berbagi ilmu, pengetahuan, kritik maupun saran. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam segala hal.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu yang telah membantu mendukung penulis dari awal kuliah sampai dengan terselesaikannya penulisan ini.

Penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi, harapannya skripsi penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua yang membacanya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan dan kemajuan di masa mendatang. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi penelitian ini.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iii
HAK CIPTA.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
4. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 <i>Good Corporate Governance</i>	8
2.1.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	8
2.1.2 Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	10
2.1.3 Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	11
2.1.4 Komisaris Independen	11
2.1.5 Komite Audit	12
2.2 Pajak.....	13
2.2.1 Pengertian pajak.....	13
2.2.2 Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	14
2.2.3 Tujuan Perencanaan Pajak	14
2.2.4 Pengukuran Perencanaan Pajak.....	15
2.3 Rekonsiliasi Fiskal	15
2.4 Pajak Penghasilan Badan.....	17
2.5 Manajemen Laba	20
2.5.1. Pengertian Manajemen Laba.....	20
2.5.2. Pengukuran Manajemen Laba.....	21
2.5.3. Bentuk-bentuk Manajemen Laba	23

2.5.4. Motivasi manajemen laba	24
2.4 Penelitian Terdahulu.....	25
2.5 Kerangka Pemikiran	32
2.6 Hipotesis penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	36
3.2.1 Objek Penelitian.....	36
3.2.2 Unit Analisis	36
3.2.3 Lokasi Penelitian	36
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	36
3.4 Operasional Variabel	37
3.5 Metode Penarikan Sampel	38
3.6 Metode Pengumpulan Data	39
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data.....	39
3.7.1 Statistik Deskriptif	40
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	40
1. Uji Normalitas	40
2. Uji Multikolonieritas.....	41
3. Uji Autokorelasi.....	41
4. Uji Heteroskedastisitas	41
3.7.3 Uji Hipotesis	41
1. Uji Statistik F (Secara Simultan).....	42
2. Uji statistik t.....	42
3. Koefisien Determinasi (R^2).....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Hasil Pengumpulan Data	43
4.2. Analisis Data	57
4.2.1. Statistik Deskriptif	57
4.2.2. Uji Asumsi Klasik.....	58
4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda	61
4.2.4. Pengujian Hipotesis	62
4.3. Pembahasan.....	65
4.3.1. Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> yang diproyeksikan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba	66

4.3.2. Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> yang diproyeksikan Komite Audit terhadap Manajemen Laba	67
4.3.3. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba.....	67
4.3.4. Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba.....	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	70
5.1. Simpulan	70
5.2. Saran	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Sebelumnya	18
Tabel 2.2.	Matriks Penelitian Sebelumnya	24
Tabel 3.1	Operasional Variabel dan Skala Pengukuran.....	30
Tabel 3.2	Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian	31
Tabel 3.3	Nama Perusahaan Yang Menjadi Objek Penelitian	31
Tabel 4.1.	Daftar Sampel yang Memenuhi Kriteria.....	37
Tabel 4.2	Data persentase Komisaris Independen pada 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020	43
Tabel 4.3	Data Komite Audit pada 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020	45
Tabel 4.4	Data Persentase Perencanaan Pajak pada 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020	46
Tabel 4.5	Data Persentase Manajemen Laba pada 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020	49
Tabel 4.6.	Statistik Deskriptif	51
Tabel 4.7.	Hasil Uji Normalitas	53
Tabel 4.8.	Hasil Uji Multikolinearitas	54
Tabel 4.9.	Hasil Uji Autokorelasi	55
Tabel 4.10.	Hasil Regresi Linier Berganda.....	56
Tabel 4.11.	Hasil Uji Parsial (Uji t)	57
Tabel 4.12.	Hasil Simultan (Uji F).....	58
Tabel 4.13.	Koefisien Determinasi (R ²)	59
Tabel 4.14.	Rekapitulasi Uji Hipotesis	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Rata-Rata Grafik <i>Good Corporate Governance</i> , Perencanaan Pajak, dan Manajemen laba Periode 2016-2020.....	5
Gambar 1.2.	Kerangka Pemikiran.....	2
Gambar 4.1	Data persentase Komisaris Independen pada 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.....	44
Gambar 4.2	Data Komite Audit pada 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020	45
Gambar 4.3	Perkembangan Data Perencanaan Pajak Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Periode Tahun 2016–2020.....	47
Gambar 4.4	Perkembangan Data Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Periode Tahun 2016–2020.....	49
Gambar 4.5	Plot Histogram	53
Gambar 4.6	Scatterplot Heteroskedastisitas	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Tabulasi Data Dewan Komisaris (X_1)	71
Lampiran 2	Tabulasi Komite Audit (X_2).....	74
Lampiran 3	Tabulasi Data Perencanaan Pajak (X_3).....	74
Lampiran 4	Tabulasi Data Manajemen Laba (Y).....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laba merupakan cerminan kinerja perusahaan yang dapat dikelola secara oportunistik dan efisien. Dikelola secara oportunistik artinya dikelola untuk meningkatkan laba sesuai dengan yang diinginkan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan dikelola secara efisien artinya dikelola untuk meningkatkan keinformatifan informasi. Untuk menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba, manajemen cenderung mengelola laba secara oportunistik dan melakukan manipulasi laporan keuangan agar menunjukkan laba yang memuaskan meskipun tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Abdillah, dkk, 2017). Perusahaan dapat bertahan hanya dengan laba yang dihasilkannya, karena dari laba tersebut dapat membiayai semua pengeluaran perusahaan, jadi menghasilkan laba merupakan tujuan utama perusahaan agar perusahaan tersebut mampu bertahan dalam menjalankan bisnisnya. Menurut *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC)* No. 1, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir *earnings power* perusahaan di masa yang akan datang (Sartika, 2019). Bagi *stakeholder*, laba berarti peningkatan nilai ekonomis yang akan diterima melalui pembagian dividen. Laba juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu, yang pada umumnya menjadi perhatian pihak-pihak tertentu terutama dalam menaksir kinerja atas pertanggungjawaban manajemen. Dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospeknya di masa depan.

Manajemen laba menurut (Wardani dan Santi, 2018) adalah “aktivitas manajerial untuk “mempengaruhi” laporan keuangan baik dengan cara memanipulasi data atau informasi keuangan perusahaan maupun dengan cara pemilihan metode akuntansi yang diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan”. Manajemen laba dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajer. Manajemen laba berhubungan erat dengan tingkat perolehan laba atau prestasi suatu perusahaan, hal ini karena tingkat keuntungan atau laba dikaitkan dengan prestasi manajemen dan juga besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer. Manajemen laba dapat memperbaiki hubungan dengan pihak kreditor dan juga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Dengan membesarkan atau mengecilkan laba perusahaan, dan agar menciptakan kinerja perusahaan terkesan lebih baik dari yang sebenarnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi dilakukannya manajemen laba yaitu perpajakan, penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan. dengan kata lain

manajemen ingin mengecilkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak, Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak. Laba merupakan salah satu informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Sebagai manajer senior, CEO memiliki peranan penuh dalam penyusunan laporan keuangan tersebut (Lim dan Hutomo, 2016: 15). Pemberian kompensasi berdasarkan kinerja yang diukur dari laba akan mendorong CEO untuk melakukan manajemen laba sebagai upaya untuk memaksimalkan kompensasi yang diterima oleh CEO tersebut. CEO akan termotivasi untuk melakukan manajemen laba agresif untuk memaksimalkan bonus yang diterima serta memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan hak opsi. Menurut beberapa insentif lain dalam melakukan manajemen laba adalah untuk mengurangi biaya politik, untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah, untuk menghindari tuntutan dari serikat buruh (Lim dan Hutomo, 2016: 16). Oleh karena itu perusahaan harus memiliki *good corporate governance*, agar tercipta tatanan struktur organisasi yang baik, dan memiliki petinggi perusahaan atau manajer-manajer yang memiliki integritas yang baik. Agar perusahaan yang dipimpin mencapai tujuan yang diinginkan oleh semua pihak yang terkait didalam perusahaan.

Untuk meminimumkan terjadinya manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, perlu adanya suatu mekanisme pengawasan. Untuk mengawasi perilaku manajemen dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* diterapkan untuk mengurangi berbagai risiko. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu system yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* yang meliputi karyawan, kreditur, dan masyarakat (Franita, 2018: 10).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di dalam situs resminya menyebutkan bahwa secara umum istilah *good corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*) (Herlambang, 2015). Ketika suatu perusahaan sudah menetapkan arahan strategis sesuai dengan harapan pemangku kepentingan, perusahaan harus melakukan manajemen risiko (*risk management*) untuk merespon ketidakpastian yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Setelah itu, organisasi harus memantau dan memastikan bahwa seluruh kebijakan, pengendalian, dan peraturan yang berlaku tersebut dipatuhi melalui sistem manajemen kepatuhan (*compliance*).

Penerapan *good corporate governance* di perusahaan memiliki andil yang besar dan manfaat yang bisa membuat perubahan positif bagi perusahaan baik kalangan investor, pemerintah maupun masyarakat umum. Penerapan *good corporate governance* pada hakikatnya merupakan suatu bentuk manajemen yang signifikan di perusahaan. *Good corporate governance* sangat penting bagi perusahaan karena untuk Meminimalkan penyalahgunaan wewenang karena prinsip-prinsip dalam implementasi *good corporate governance* yang baik akan mencegah kemungkinan dilakukannya rekayasa oleh pihak-pihak terkait. Meningkatkan transparansi dengan adanya pencatatan dan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas. Mengoptimalkan pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya dapat memberikan pengaruh positif pada kinerja perusahaan. Tantangan terbesar dalam mengimplementasikan *good corporate governance* adalah mengubah kultur perusahaan sehingga terbentuk kepemimpinan yang tegas, memiliki integritas, dan berkompeten. jika perusahaan menyadari besarnya manfaat penerapan *good corporate governance* merupakan suatu keharusan, bukan lagi sekadar opsi, tentunya seluruh pihak terkait akan terpacu untuk menerapkan *good corporate governance* di perusahaannya.

Dengan adanya *good corporate governance* didalam perusahaan dapat memperkecil risiko-risiko yang akan dihadapi perusahaan seperti terjadinya manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi setiap pemangku kepentingan perusahaan dan tidak tercapainya tujuan perusahaan.

Hubungan bisnis perusahaan selain dengan perusahaan lain, juga terjalin dengan pemerintah. Dalam konteks hubungan antara perusahaan dengan pemerintah, yaitu berkaitan dengan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak yang telah ditentukan dengan menggunakan laba sebagai dasar perhitungan dan pemerintah memiliki hak untuk menerima kewajiban pajak dari perusahaan tersebut. Bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba bersih, Sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan sumber utama penerimaan bagi negara. Atas persepsi tersebut akhirnya banyak perusahaan yang melakukan cara agar dapat meminimalisir kewajiban dalam membayar pajak. Salah satu cara yang sering digunakan manajemen untuk meminimalisir kewajiban pajak adalah dengan perencanaan pajak.

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh (Pohan, 2016 : 18) “Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”. Dengan adanya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah, manajemen melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan

peraturan-peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagi kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. Hubungan perencanaan pajak dengan manajemen laba ialah semakin besar angka dari perencanaan pajak maka akan semakin tinggi untuk mendeteksi manajemen laba.

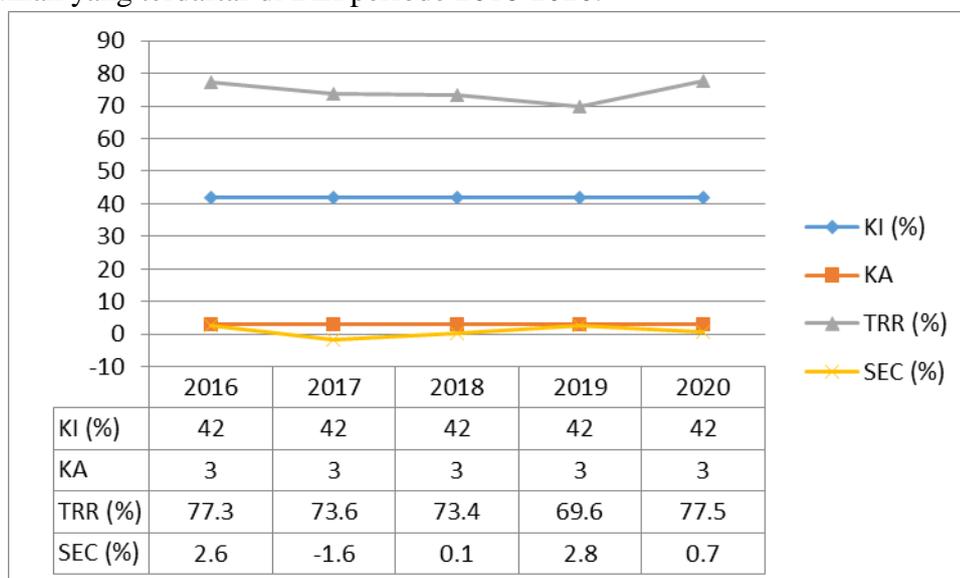
Contoh kasus manajemen laba yang terjadi di Indonesia yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tanpa diduga berhasil mencatatkan kinerja cemerlang pada 2018. Bukan ruginya lagi yang menurun, tapi perusahaan mencetak laba bersih US\$809,84 ribu atau Rp11,33 miliar (Rp14.000 per dolar Amerika Serikat). Namun, berita itu rupanya tak disambut baik oleh seluruh pihak. Dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak menandatangani laporan buku tahunan Garuda 2018. Keduanya merupakan perwakilan dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd selaku pemilik dan pemegang 28,08 persen saham Garuda Indonesia. Mereka tak sepakat dengan salah satu transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang dibukukan sebagai pendapatan oleh manajemen. Dalam surat yang didapatkan oleh awak media ketika Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berlangsung pada Rabu (24/4) tertulis bahwa Mahata bekerja sama secara langsung dengan PT Citilink Indonesia. Melalui kesepakatan itu, keuntungan yang diraih Grup Garuda Indonesia sebesar US\$239.940.000, dengan US\$28.000.000 di antaranya merupakan bagi hasil Garuda Indonesia dengan PT Sriwijaya Air. Hanya saja, perusahaan sebenarnya belum mendapatkan bayaran dari Mahata atas kerja sama yang dilakukan. Namun manajemen tetap menuliskannya sebagai pendapatan, sehingga secara akuntansi Garuda Indonesia menorehkan laba bersih dari sebelumnya yang rugi sebesar US\$216,58 juta. Sedikit menengok ke belakang, kinerja Garuda Indonesia memang tertekan beberapa tahun terakhir. Pada 2014, perusahaan merugi sebesar US\$370,04 juta. Beruntung, pada 2015 mencatatkan laba sebesar US\$76,48 juta. Tak bertahan lama, kinerja Garuda Indonesia justru merosot tajam pada 2016 menjadi hanya US\$8,06 juta. Kemudian, perusahaan pun merugi pada 2017 sebesar US\$216,58 juta. (<https://www.cnnindonesia.com/2019>).

Dari fenomena diatas peneliti ingin mengetahui apakah dengan meningkatnya pertumbuhan industri makanan dan minuman, perusahaan melakukan tindakan manajemen laba atau tidak, dengan cara menaikkan atau menurunkan laba. Industri makanan dan minuman terus menunjukkan daya saingnya. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian ekspor sektor yang menjadi prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 tersebut, yang menyentuh angka USD 20 miliar hingga September 2019. Sektor makanan dan minuman juga berkontribusi lebih dari sepertiga (36,49%) dari total Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan non-migas hingga triwulan III tahun 2019 (Embu, 2019)).

Di dalam penelitian ini untuk mengukur *good corporate governance* menggunakan proksi komisaris independen (KI) dan komite audit (KU), perencanaan

pajak menggunakan *Tax Retention Rate* (TRR), dan manajemen laba menggunakan *nondiscretionary accruals* (NDA).

Berikut disajikan dalam grafik rata-rata *good corporate governance*, perencanaan pajak dan manajemen laba pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.



(sumber : www.idnfinancials.com data diolah oleh peneliti, 2020)

Gambar 1.1

Rata-rata grafik *good corporate governance*, perencanaan pajak, dan manajemen laba periode 2016-2020

Berdasarkan gambar 1.1 terdapat penurunan *Tax Retention Rate* (TRR) perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2019 yang diukur menggunakan *Tax Retention Rate*. Didalam data gambar 1.1 perencanaan perpajakan mengalami penurunan, pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 77.3% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 69.6%. Semakin tinggi nilai perencanaan pajak maka dianggap semakin besar perencanaan pajak dapat mendekteksi manajemen laba. Dapat dilihat dari grafik diatas bahwa untuk *Good Corporate Governance* cenderung baik dan stabil, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Amelia dan Hernawati, 2016 : 68 bahwa apabila semakin tinggi tingkat komisaris independen (KI) dalam perusahaan semakin baik untuk mengawasi manajer dalam melakukan tindak kecurangan, sebaliknya apabila semakin sedikit tingkat dewan komisaris independen dalam perusahaan semakin lemah pula pengawasan terhadap praktek kecurangan yang dilakukan manajer. Perdana (2019) mengatakan bahwa apabila semakin banyak jumlah rapat komite audit yang diadakan, maka akan mampu mengurangi tindakan manajemen laba.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba. Selain *good corporate governance*, beberapa penelitian terdahulu juga mengaitkan pengaruh perencanaan pajak terhadap

manajemen laba. Dalam beberapa penelitian terdahulu *good corporate governance* diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris dan komite audit seperti penelitian yang dilakukan oleh Setyarso Herlambang (2018), hasilnya menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh Made Dwi Parama Yogi dan I Gusti Ayu Eka Damayanthi dengan hasil *Good corporate governance* yang diproksi dengan dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada manajemen laba.

Selain *good corporate governance*, banyak juga penelitian yang menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. seperti penelitian yang dilakukan oleh Reza Hangga Dewa Kumala Putra, Ketut Sunarta, Haqi Fadillah (2019) dengan Hasil pengujian menunjukkan perencanaan pajak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih (2014) Berdasarkan hasil analisis data, terlihat bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tindakan manajemen laba merupakan sebuah keputusan manajemen yang dapat merugikan investor dan pemakai informasi laporan keuangan lainnya.
2. Praktik Manajemen Laba tidak dilarang selama itu dalam batasan yang diperbolehkan oleh standar akuntansi, tetapi kenyataannya dalam praktker manajer masih banyak yang menyalahgunakan aturan ini, agar mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih dari praktik Manajemen Laba ini.
3. Belum diterapkannya *Good Corporate Governance* di perusahaan menyebabkan timbulnya risiko dan kecurangan dalam pelaporan keuangan.
4. Perhatian investor selama ini cenderung terpusat pada informasi laba dan rugi dalam laporan keuangan tanpa memperhatikan proses yang digunakan untuk mencapai laba tersebut apakah perusahaan menjalankan *good corporate governance* dengan baik atau tidak.
5. Semakin tinggi nilai perencanaan pajak maka dianggap semakin besar perencanaan pajak dapat mendekteksi manajemen laba.
6. Terdapat perbedaan pendapat antara peneliti terdahulu.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
2. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
3. Apakah *Good Corporate Governance* dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menjelaskan pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menjelaskan pengaruh *Good Corporate Governance* dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi manajemen perusahaan bahwa pentingnya pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kegiatan manajemen laba dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan risiko yang diterima oleh perusahaan terkait hal tersebut, jadi manajemen dapat merancang suatu tata kelola perusahaan yang sesuai dengan perusahaannya dan terhindar dari penyimpangan yang akan dilakukan oleh manajemen dalam membuat keputusan.

2. Kegunaan Akademis

- a. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat khususnya bagi pembaca mengenai *good corporate governance*, perencanaan pajak dan manajemen laba.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan tentang hal-hal yang mempengaruhi manajemen laba antara lain penerapan *good corporate governance* di dalam perusahaan dan perencanaan pajak dan juga dapat dijadikan perbandingan serta tambahan referensi yang dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya dengan judul penelitian yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Good Corporate Governance*

2.1.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Menurut Tunggal (2013) dalam (Nuryan, 2016) “*Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat sekitar.”

Menurut (Oktaviani, dkk, 2020) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, mencakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana ekstern.

Menurut Rimardhani, dkk (2016) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan mengurangi konflik agensi agar dapat mencapai tujuan perusahaan.

Manurut Carisa (2019) tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Menurut Effendi (2016) pengertian *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan”.

Menurut Franita (2018) pengertian *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu system yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaga yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* yang meliputi karyawan, kreditur, dan masyarakat”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kepentingan intern dan ektern perusahaan baik hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan memperhatikan *stakeholder* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

2.1.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Pedoman umum tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagai berikut (Maharani, 2017):

1. *Transparency* (keterbukaan) yaitu, keterbukaan dalam melaksanakan proses kegiatan perusahaan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. *Accountability* (akuntabilitas) yaitu, pertanggung jawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan termasuk pemegang saham. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
3. *Responsibility* (tanggungjawab) yaitu, kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. *Independency* (Kemandirian) yaitu, suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dan tanpa benturan kepentingan pihak manapun. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. *Fairness* (Kewajaran) yaitu, kewajaran dan kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Sebenarnya, tiga dari kelima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut: transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab mempunyai arti yang sangat erat dan tumpangtindih. Keempat prinsip ini merupakan jawaban langsung atas permasalahan/skandal yang dihadapi oleh dunia usaha, bukan hanya di Indonesia tetapi juga diseluruh dunia.

2.1.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan *good corporate governance* di perusahaan memiliki andil yang besar dan manfaat yang bisa membuat perubahan positif bagi perusahaan baik kalangan investor, pemerintah maupun masyarakat umum. Penerapan *good corporate governance* pada hakikatnya merupakan suatu bentuk change manajemen yang signifikan di perusahaan.

Menurut (Susanto dan Ardini, 2016) Manfaat *good corporate governance* dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. Mengurangi *agency cost*
2. Meningkatkan nilai saham perusahaan
3. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau manajemen puncak dan manajemen perusahaan, sekaligus meningkatkan mutu hubungan manajemen puncak dengan manajemen senior perusahaan.

Menurut (Ferial, dkk, 2016) Manfaat penerapan *good corporate governance* adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, meminimalkan pembiayaan dalam perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan.

Dengan adanya *good corporate governance* didalam perusahaan maka secara tidak langsung akan mendorong pemanfaatan sumberdaya perusahaan ke arah yang efektif dan efisien, juga maningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik.

Penerapan dalam *good corporate governance* ada beberapa yaitu ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit. Dalam penelitian ini variabel *good corporate governance* diproksikan dengan komisaris independen dan komite audit.

2.1.4 Komisaris Independen

komisaris independen memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, dikarenakan anggota dewan komisaris independen yang dipilih secara langsung oleh pemegang saham guna untuk bertindak independen dalam mengawasi aktivitas manajer dalam melaporkan keuangan, dengan demikian tindakan manajemen laba dalam perusahaan dapat diminimalisir (Amelia dan Hernawati, 2016)

Menurut Fadillah (2017) Komisaris independen didefinisikan sebagai “seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dengan dewan

komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik”.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 dewan komisaris adalah “Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”.

Carisa (2019) menetapkan beberapa kriteria untuk menjadi komisaris independen pada perusahaan tercatat sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan
2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan atau Komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan
3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan bersangkutan
4. Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu tiga tahun terakhir
5. Tidak menjadi partner atau prinsipal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain yang terafiliasi.
6. Beban dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berfikir independen demi kepentingan perusahaan
7. Memahami peraturan perundang-undangan PT, UU Modal dan UU serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

Menurut Rachmitasari (2015), proksi komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan.

Adapun rumus untuk menghitung komisaris independen sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}} \times 100\%$$

2.1.5 Komite Audit

Menurut Ayu dan Septiani (2017: 5-6) Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk Dewan Komisaris yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan internal, memastikan keefektifitasan auditor internal dan auditor eksternal, serta memperkuat independensi auditor.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK 55/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Komite Audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dan dewan direksi dalam melaksanakan tugas mereka, terutama dalam pengendalian internal perusahaan dan pelaporan informasi keuangan. Komite Audit harus mampu memahami isu-isu akuntansi yang dihadapi perusahaan dan mampu memberi saran kepada dewan mengenai dampak dari isu-isu tersebut (Walace & Zinkin. 2015).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit ialah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan agar dapat terciptanya efektifitas pengendalian dalam pengelolaan manajemen.

Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang ada dalam perusahaan. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$KA = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak menurut Narwanti (2018) menyatakan bahwa:

“Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara atau dapat dikatakan sebagai iuran wajib kepada negara yang pembayarannya dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tidak mendapatkan prestasi secara langsung. Berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum yang berhubungan dengan suatu tugas negara untuk menjalankan pemerintahan”.

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Definisi menurut Sumarsan (2017) menyatakan bahwa:

“Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan karena adanya pengalihan sumber dari sektor swasta kepada sektor pemerintah, dimana kegiatan tersebut tidak diakibatkan karena pelanggaran hukum. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan terlebih dahulu, dimana kegiatan tersebut tidak memperoleh imbalan secara langsung maupun proposional. Dengan tujuan agar pemerintah dapat melaksanakan suatu tugas-tugasnya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan”.

Definisi menurut Pohan (2016) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk pelaksanaan serta peningkatan pembangunan negara yang mamiliki tujuan untuk meningkatkan suatu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat ikut berperan aktif dengan memberikan kontribusinya untuk peningkatan pendapatan negara yang sesuai dengan kemampuannya”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

2.2.2 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Rustam, dkk (2019) perencanaan pajak sebagai berikut:

“Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan”.

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Pohan (2016) adalah sebagai berikut :

“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”.

Menurut Lestari, dkk, (2018) definisi perencanaan pajak yaitu:

“langkah awal dalam manajemen pajak, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konskuensi pajaknya”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak melanggar undang undang.

2.2.3 Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang

laba yang tersedia, baik untuk dibagi kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. Pohan (2016) mengemukakan bahwa Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang.
2. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam lingkup dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Memaksimalkan laba setelah pajak.
4. meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
5. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain :
 - Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.
 - Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH Pasal 21, pasal 22, pasal 23).

2.2.4 Pengukuran Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Negara dan Suputra, 2017). TRR mengukur efektivitas dari perencanaan pajak, yang berarti semakin tinggi nilai TRR maka semakin tinggi pula efektivitas dari upaya perencanaan pajak yang dilakukan. Besarnya TRR dapat mengukur *tax rate* atau besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut dengan menggunakan rumus (1-TRR) yang menghasilkan besarnya pajak yang harus dibayarkan (Febriyanti, 2019 : 3).

Adapun rumus untuk mengukur perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{TRR} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.3 Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Resmi (2017), Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto / laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-pebedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*).

Setiawan dan Musri (2016) menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan. Subiyatko (2013) mengatakan bahwa rekonsiliasi fiskal dilakukan baik untuk pos-pos pendapatan maupun pos-pos biaya. Secara ringkas dilakukan rekonsiliasi fiskal dalam hal:

- 1) WP memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat 2)
 Apabila WP memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final maka penghasilan tersebut harus direkonsiliasi atau dikeluarkan dari perhitungan PPh terutang akhir tahun, karena atas penghasilan tersebut telah dikenakan PPh Final sehingga kewajiban pembayaran pajaknya sudah selesai. Selanjutnya PPh Final yang sudah dibayar / dipotong atas penghasilan tersebut tidak boleh lagi menjadi kredit pajak.
 Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) dikenakan pada penghasilan atau pendapatan tertentu, yang diantaranya berupa:
 - a) Peredaran bruto (omzet penjualan) dari sebuah usaha di bawah Rp4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak
 - b) Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh perusahaan
 - c) Hadiah seperti undian
 - d) Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha
 - e) Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah atau bangunan
 - f) Pendapatan lainnya yang spesifik seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah
- 2) WP memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat 3).
 Apabila WP memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak maka penghasilan tersebut harus juga direkonsiliasi karena WP tidak perlu membayar PPh atas penghasilan tersebut.
- 3) WP mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan/*Non Ductible Expense* (Pasal 9)
 Apabila WP mengeluarkan biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan maka biaya tersebut tidak bisa diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun (direkonsiliasi). Perlakuan yang berbeda atas biaya jenis ini menimbulkan adanya Beda Tetap yaitu perbedaan yang benar-benar riil serta bersifat pasti dan tetap karena antara SAK dan UU PPh terjadi pengaturan yang berbeda. Atas perbedaan ini WP harus mengoreksi perbedaan yang timbul.
- 4) WP mengeluarkan biaya yang boleh menjadi pengurang tetapi metode pengakuan biaya tersebut diatur tersendiri oleh ketentuan fiskal.

Apabila WP mengeluarkan biaya yang metode pengakuannya diatur tersendiri oleh ketentuan pajak maka besarnya biaya yang boleh menjadi pengurang juga harus disesuaikan dengan ketentuan pajak.

- 5) WP mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh Final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non Final (*Joint Cost*)

Apabila WP mengeluarkan biaya yang semata-mata digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang telah dikenakan PPh Final atau pendapatan yang bukan objek pajak, maka biaya tersebut harus direkonsiliasi seluruhnya. Adalah hal yang logis bila suatu penghasilan direkonsiliasi maka biaya yang benar-benar terkait untuk mendapatkan penghasilan tersebut juga ikut direkonsiliasi. Tetapi jika biaya tersebut digunakan untuk mendapatkan semua jenis penghasilan, misalnya biaya penyusutan gedung, maka biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan harus dihitung secara proporsional.

Berdasarkan penjelasan menurut beberapa para ahli tentang pengertian Laporan Keuangan Fiskal, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan komersial yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.4 Pajak Penghasilan Badan

2.4.1. Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional atau regresif. UU No 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008, (selanjutnya disebut dengan UU PPh). Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Waluyo 2018).

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, (Siti Resmi, 2019). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak, perorangan, badan atau yang berbadan hukum lainnya, sesuai dengan ketentuan dan kriteria masing masing subjek pajak, yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pajak Penghasilan Badan secara umum dapat diartikan pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Badan, dalam hal ini yaitu laba perusahaan setelah

dilakukan rekonsiliasi fiskal (laba fiskal). Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%.

2.4.2. Subjek Pajak Badan

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak Badan dibedakan menjadi subjek pajak badan dalam negeri dan subjek pajak badan luar negeri. Badan menjadi subjek pajak dalam negeri apabila didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sebaliknya, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia statusnya adalah subjek pajak luar negeri.

2.4.3. Penghasilan Wajib Pajak Badan

Menurut Pasal 4 Undang - Undang Pajak Penghasilan (2008), penghasilan didefinisikan sebagai :

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis,
2. Yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) Wajib Pajak,
3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
4. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
5. Dengan nama dan dalam bentuk apa pun

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016), Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib tersebut. Suatu penghasilan bisa berbentuk uang (benefit in cash) ataupun barang atau kenikmatan/fasilitas (benefit in kind).

2.4.4. Objek Pajak Penghasilan Badan

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Pajak Penghasilan (2008), yang menjadi objek PPh Badan dapat berupa:

- 1) Laba usaha.
- 2) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 3) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- 4) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 5) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 6) Royalti.
- 7) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 8) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 9) Penerimaan atas perolehan pembayaran berkala.
- 10) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 11) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 13) Premi asuransi, termasuk premi reasuransi
- 14) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 15) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 16) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
- 17) Imbalan bunga
- 18) Surplus Bank Indonesia

2.4.5. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Badan

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Undang - Undang Pajak Penghasilan, (2008) beberapa non objek PPh yang terkait dengan Wajib Pajak Badan adalah :

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
2. harta hibahan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

3. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
5. Penghasilan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, berupa iuran yang diterima atau diperoleh pemberi kerja maupun pegawai dan penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
6. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
7. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
8. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
9. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan formal yang ditanamkan kembali paling lama 4 (empat) tahun yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
10. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.5 Manajemen Laba

2.5.1. Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba dipandang sebagai suatu konsep lintas periode, dimana laba digeser dari satu periode ke periode lainnya. Sampai saat ini manajemen laba belum

didefinisikan secara akurat dan berlaku secara umum. Walaupun demikian beberapa definisi sudah dapat diterima secara luas.

Menurut Yunietha dan Palupi (2017) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:

“Manajemen laba merupakan kosmetik, dimana manajer memanipulasi tindakan akrual yang tidak memiliki konsekuensi terhadap arus kas. Ketika manajer memilih tindakan yang memiliki konsekuensi arus kas dengan tujuan mengubah laba, maka tindak manajemen laba akan terlihat secara nyata”.

Manurut Panjaitan dan Muslih (2019) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:

“manajemen laba merupakan tindakan perekayasaan laporan keuangan terutama untuk merekayasa laba perusahaan agar sesuai dengan yang diinginkan”.

Menurut Panjaitan dan Muslih (2019) manajemen laba merupakan tindakan perekayasaan laporan keuangan terutama untuk merekayasa laba perusahaan agar sesuai dengan yang diinginkan

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dilakukan secara sengaja, dalam batasan untuk mengarah pada suatu tingkat laba yang diinginkan. Tindakan ini merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

2.5.2. Pengukuran Manajemen Laba

1. Model Healy

Adapun rumus manajemen laba disini menggunakan medel *Healy*. Secara umum medel ini tidak berbeda dari model-model lain yang dipergunakan untuk mendeteksi manajemen laba dalam menghitung nilai total akrual (TAC), yaitu mengurangi laba akuntansi yang diperolehnya selama satu periode tertentu dengan arus kas operasi periode bersangkutan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ Operation$$

Untuk menghitung *non discretionary Accruals* model *Healy* membagi rata-rata total akrual (TAC) dengan total aktiva periode sebelumnya. Oleh sebab itu total akrual selama periode estimasi merupakan representasi ukuran *non discretionary accruals* dan rumusnya sebagai berikut:

$$NDA_t = \frac{\sum TAC}{TA}$$

Keterangan:

NDA = *non discretionary accruals*

TAC = Total akrual yang di skala dengan total aktiva

TA = total asset yang dimasukan dalam periode estimasi

t = Tahun sekarang

2. Metode De Angelo

Angelo (2015) menguji manajemen laba dengan menghitung perbedaan pertama dalam total akrual dan dengan mengasumsikan bahwa perbedaan pertama memiliki nilai nol yang diharapkan berdasarkan hipotesis nol yang menyatakan tidak ada manajemen laba. Model ini menggunakan total akrual periode lalu (diskala dengan total aset t-1) sebagai ukuran *Nondiscretionary Accruals* yaitu:

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

Keterangan:

NDA_t : Estimasi *Nondiscretionary Accrual*

TAC_{t-1} : Total akrual dibagi total aset 1 tahun sebelum tahun t

3. Model Industry

Suyanto (2017) menyusun model pengukuran manajemen laba yang dikenal dengan Model Industry. Serupa dengan Model Jones, Model Industri menyederhanakan anggapan bahwa akrual non diskretioner konstan sepanjang waktu. Namun, alih-alih mencoba secara langsung memodelkan faktor penentu akrual nondiskretioner, Model Industri mengasumsikan bahwa variasi dalam faktor penentu *Nondiscretionary Accruals* adalah umum di seluruh perusahaan di industri yang sama. Model Industri untuk *Nondiscretionary Accruals* adalah Dechow dan Sloan (1998) dalam Suyanto (2017):

$$NDA_t = \gamma_1 + \gamma_2 \text{ median I (TAt)}$$

Dimana:

- Median I (TAt) = nilai median dari total akrual yang diukur dengan aset tahun t-1 untuk semua perusahaan non-sampel dalam kode industri yang sama.
- Parameter spesifik perusahaan γ_1 dan γ_2 diperkirakan menggunakan koefisien regresi pada pengamatan di Periode estimasi.

4. Model Stubben

Conditional revenue model diperkenalkan oleh Stubben (2017) dalam Suyono (2017) atas dasar ketidakpuasan terhadap model akrual yang umum digunakan sebelumnya. Pertama, keterbatasan model akrual adalah bahwa estimasi cross-sectional secara tidak langsung mengasumsikan bahwa perusahaan dalam industri yang sama menghasilkan proses akrual yang sama. Kedua, model akrual juga tidak menyediakan informasi untuk komponen mengelola laba perusahaan dimana model akrual tidak membedakan peningkatan diskresionari pada laba melalui pendapatan atau komponen beban (Stubben, 2017). Berikut merupakan formula dari conditional revenue model:

$$AR_{it} = \alpha + \beta_1 R_{it} + \beta_2 R_{it} \times SIZE_{it} + \beta_3 R_{it} \times AGE_{it} + \beta_4 R_{it} \times AGE_SQ_{it} + \beta_5 R_{it} \times GRR_P_{it} + \beta_6 R_{it} \times GRR_N_{it} + \beta_7 R_{it} \times GRM_{it} + \beta_8 R_{it} \times GRM_SQ_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Arit : Piutang Akruwal perusahaan i pada periode t, R = annual revenue,

IZE : Natural log dari total asset saat akhir tahun,

AGE : Natural log umur perusahaan,

GRR_P : Industry median adjusted *revenue growth* (= 0, jika negatif)

GRR_N : Industry median adjusted *revenue growth* (= 0, jika positif)

GRM : Industry median adjusted *gross margin at end of fiscal year*

_SQ : *Square of variable*

ε : *Annual change*

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi

5. Model Scaled Earning Changes (SEC)

Pada model ini lebih memfokuskan kepada elemen laba perusahaan. Pada model ini meneliti bagaimana perubahan laba suatu perusahaan yang dibandingkan dengan nilai pasar ekuitas perusahaan tersebut. Cara pengukuran menggunakan Scaled Earning Changes (SEC) yaitu dengan mengurangkan laba bersih tahun ini dengan laba bersih tahun sebelumnya yang kemudian dibagi dengan *Market Value of Equity* (MVE) tahun sebelumnya (Intan, 2018).

$$\text{Scaled Earnings Changes} = \frac{\text{Net Income}_{it} - \text{Net Income}_{(t-1)}}{MVE_{(t-1)}}$$

Keterangan :

*Net Income*_{it} = Laba bersih perusahaan i pada tahun t

*Net Income*_(t-1) = Laba bersih perusahaan i pada tahun t-1

*MVE*_(t-1) = *Market Value of Equity* perusahaan pada tahun t-1

Market Value of Equity diukur dengan mengalikan jumlah saham beredar perusahaan i pada akhir tahun t-1 dengan harga saham perusahaan i pada akhir tahun t-1.

MVE = Jumlah saham beredar (t-1) X harga saham (t-1)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran dengan menggunakan *model Scaled Earning Changes* (SEC).

2.5.3. Bentuk-bentuk Manajemen Laba

Bentuk-bentuk manajemen laba yang dikemukakan oleh Scott (2015) meliputi:

1. *Taking a bath.*
2. *Income minimization.*
3. *Income maximization.*

4. *Income smoothing*.

Adapun penjelasan mengenai bentuk-bentuk manajemen laba diatas adalah sebagai berikut:

1. *Taking a bath* (tekanan dalam organisasi)

Disebut juga *big baths*, bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian direksi. Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika kondisi yang tidak menguntungkan bisa dihindari. Akibatnya, laba periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun kondisi tidak menguntungkan.

2. *Income minimization* (meminimumkan laba)

Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena motif politik atau motif meminimumkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan (*write off*) atas barangbarang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, riset, dan pengembangan yang cepat.

3. *Income maximization* (memaksimalkan laba)

Memaksimalkan laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, selain itu memperoleh bonus yang lebih besar, selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*)

4. *Income smoothing* (perataan laba)

Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan *trend* pertumbuhan laba yang stabil daripada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis.

2.5.4. Motivasi manajemen laba

Menurut Utami (2020) Terjadinya praktik manajemen laba dapat didasari oleh beberapa motivasi diantaranya:

1) Motivasi Bonus

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai *feedback* atau evaluasi atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Insentif ini diberikan dalam jumlah relatif tetap dan rutin. Sementara, bonus yang relatif lebih besar nilainya hanya akan diberikan ketika kinerja manajer berada diarea pencapaian bonus yang telah ditetapkan oleh pemegang saham.

2) Motivasi Utang

Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham, untuk kepentingan ekspansi perusahaan, manajer seringkali melakukan beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditor. Agar kreditor mau menginvestasikan

dananya diperusahaan, tentunya manajer harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaannya. Dan untuk memperoleh hasil maksimal, yaitu pinjaman dalam jumlah besar, perilaku kreatif dari manajer untuk menampilkan performa yang baik dari laporan keuangannya.

3) Motivasi Pajak

Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan *go public* dan selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk kepentingan perpajakan. Kepentingan ini didominasi oleh perusahaan yang belum *go public*.

4) Motivasi Penjualan Saham

Perusahaan yang akan *go public* ataupun sudah *go public* akan melakukan penawaran saham perdananya ke publik atau lebih dikenal dengan istilah *Intial Public Offerings* (IPO) untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor. Demikian juga dengan perusahaan yang sudah *go public*, untuk kelanjutan ekspansi usahanya, perusahaan akan menjual sahamnya ke publik baik melalui penawaran kedua, penawaran ketiga dan seterusnya.

5) Motivasi Pergantian Direksi

Praktik manajemen laba biasanya terjadi pada sekitar periode pergantian direksi atau *chief executive officer* (CEO). Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kerjanya tetap terlihat baik pada tahun terakhir ia menjabat. Perilaku ini ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan laba yang cukup signifikan pada periode menjelang berakhirnya masa jabatan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Topik penelitian ini sebelumnya sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan ditulis dalam makalah ilmiah berupa skripsi, thesis, disertasi dan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Berikut ini adalah beberapa uraian singkat mengenai hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan berpengaruh dan yang tidak berpengaruh.

Tabel 2.1
Ringkasan penelitian sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Setyarso Herlambang (2018), Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap	Independen: <i>Good Corporate Governance</i> Dependen: Manajemen Laba	komposisi dewan komisaris dewan komisaris komite audit	<ul style="list-style-type: none"> • Statistik Deskriptif • Uji Asumsi Klasik <ul style="list-style-type: none"> - Uji Normalitas - Uji Multikolinieritas - Uji Heteroskedastisitas - Uji Autokorelasi 	Hasil penelitian menunjukkan 1) Komposisi dewan komisaris dan ukuran perusahaan

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Manajemen Laba		<i>total accrual (TACC)</i> <i>discretionary accrual (DACC)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Hipotesis <ul style="list-style-type: none"> - Uji Koefisien Determinasi (R²) - Uji Signifikansi Simultan (Uji F) - Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji 	<p>berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p>2) Ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.</p>
2	A.A Gede Raka Plasa Negara dan I.D.G. Dharma Suputra (2017), Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	<p>Independen: Perencanaan Pajak</p> <p>Dependen: Manajemen Laba</p>	<i>Tax Retention Rate (TRR)</i> <i>Scaled Earning Change</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Statistik Deskriptif • Uji Hosmer and Lemeshow Test • Koefisien Determinasi • pengujian • correlation matrix • Matriks Klasifikasi • Uji Regresi Logistik • Persamaan Variabel 	<p>Hasil penelitian ini sebagai berikut.</p> <p>1) Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba</p> <p>2) Beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba.</p>
3	Dewi Kusuma Wardani dan Desifa Kurnia Santi (2018), Pengaruh <i>Tax Planning</i> , Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility	<p>Independen: <i>Tax Planning</i>,</p> <p>Dependen: Manajemen Laba</p>	<i>Tax Retention Rate (TRR)</i> <i>Nondiscretionary accruals (NDA)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan analisis regresi linear berganda • Uji asumsi klasik <ul style="list-style-type: none"> - Uji normalitas - Uji Multikolinearitas; - Uji Heteroskedastisitas - Uji Autokorelasi 	<p>Hasil penelitian sebagai berikut:</p> <p>a) Tax planning tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.,</p>

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	(CSR) Terhadap Manajemen Laba			<ul style="list-style-type: none"> • Uji hipotesis • Uji t 	<p>b) Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba</p> <p>c) Corporate social responsibility (CSR) memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba</p>
4	Fatchan Achyani dan Susi Lestari (2019), Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017.	<p>Independen: Perencanaan Pajak</p> <p>Dependen: Manajemen Laba</p>	<p><i>Tax Retention Rate (TRR)</i></p> <p><i>nondiscretionary accruals (NDA)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan analisis regresi linear berganda • Uji Asumsi Klasik <ul style="list-style-type: none"> - Uji Normalitas - Uji Multikolinearitas - Uji Heterokedastisitas - Uji Autokorelasi • Uji Hipotesis <ul style="list-style-type: none"> - Uji Regresi Linear Berganda - Uji Koefisien Determinasi - Uji T 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa</p> <p>1) Perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.</p>
5	Luh Made Dwi Parama Yogi dan I Gusti Ayu Eka Damayanthi (2016), Pengaruh Arus Kas Bebas, <i>Capital Adequacy Ratio</i> Dan <i>Good Corporate Governance</i> Pada	<p>Independen: <i>Good Corporate Governance</i></p> <p>Dependen: Manajemen laba</p>	<p>Komite audit</p> <p>Dewan komisaris independen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan analisis regresi linear berganda • Uji Asumsi Klasik <ul style="list-style-type: none"> - Uji Normalitas - Uji Autokorelasi - Uji Multikolinearitas - Uji Heteroskedastisitas • Uji Hipotesis 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa</p> <p>1) arus kas bebas berpengaruh negatif pada manajemen laba.</p> <p>2) <i>Capital adequacy ratio (CAR)</i></p>

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Manajemen Laba.			- Analisis Regresi Linear Berganda	berpengaruh positif pada manajemen laba. 3) <i>Good corporate governance</i> (GCG) yang diproksi dengan dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada manajemen laba.
6	Viola Syukrina E Janros dan Joyce Lim (2019), Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI.	Independen: <i>Good Corporate Governance</i> Dependen: Manajemen Laba	Komisaris Independen Kepemilikan manajerial Kepemilikan institusional Komite audit <i>Discretionary accruals</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan analisis regresi linear berganda • Statistik Deskriptif • Uji Asumsi Klasik <ul style="list-style-type: none"> - Uji Normalitas - Uji Multikolinieritas 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 2) Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 3) Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>4) Komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p>5) Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p>
7	<p>Selvy Yulita Abdillah dan R. Anastasia Endang Susilawati Nanang Purwanto (2019), Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Pada Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014)</p>	<p>Independen: <i>Good Corporate Governance</i></p> <p>Dependen: Manajemen Laba</p>	<p>Komite Audit</p> <p>Komisaris Independen</p> <p>Kepemilikan Institusional</p> <p>Kepemilikan manajerial</p> <p><i>discretionary accrual</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Asumsi Klasik <ul style="list-style-type: none"> - Uji Normalitas - Uji Multikolinieritas - Uji Autokorelasi - Uji Heteroskedastisitas • Persamaan analisis regresi linear berganda • Pengujian Hipotesis <ul style="list-style-type: none"> - Uji Koefisien Determinasi (R²) - Uji Statistik t (t-test) - Pengujian Signifikansi Model (F-test) 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa</p> <p>1) Komite audit berpengaruh negatif, komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p>2) kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.</p>
8	Sinaga Dan Doharman	Independen: <i>Good</i>	Ukuran Dewan Komisaris	• Analisis Statistik Deskriptif	1) Variabel independen

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	(2018), Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<i>Coorporate Governance</i> Dependen: Manajemen Laba	Komite Audit <i>discretionary accruals</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian Data • Estimasi Model Regresi Data Panel <ul style="list-style-type: none"> - <i>Common Effect Model</i> (CEM) - <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) - <i>Random Effect Model</i> (REM) • Pemilihan Model Regresi Data Panel <ul style="list-style-type: none"> - Uji Chow - Uji Hausman - Uji Langrange Multiplier (LM) • Pengujian Hipotesis <ol style="list-style-type: none"> a) Koefisien Determinasi b) Uji Simultan (Uji F) c) Uji Parsial (Uji t) 	<p><i>good corporate governance</i>, <i>leverage</i>, dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.</p> <p>2) Secara parsial, <i>good corporate governance</i> yang terdiri dari komite audit dan ukuran dewan komisaris, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba,</p> <p>3) Variabel profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba.</p>
9	Santana dan Wirakusuma (2016), Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktek Manajemen Laba.	Independen: Perencanaan pajak Kepemilikan manajerial Ukuran perusahaan Dependen: Praktek manajemen laba	<i>TAX PLAN Nondiscretionary accuarls (NDA)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Statistik Deskriptif - Analisis Regresi Linear Berganda • Uji Koefisien Determinasi (R²) • Uji Kelayakan Model (Uji F) • Uji Hipotesis (Uji t) 	Perencanaan pajak memiliki pengaruh positif, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan praktek manajemen laba.
10	Frisca Syllia Lavenia Lolana, Susi	Independen: <i>Good Corporate</i>	Komisaris independen	<ul style="list-style-type: none"> • analisis jalur • persamaan linear 	Hasil penelitian ini adalah

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Dwimulyani (2019), Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba Dengan <i>Tax Avoidance</i> Sebagai Variabel Intervening	<i>Governance</i> Dependen: Manajemen laba Intervening: <i>Tax avoidance</i>	Kualitas audit <i>Discretionary accrual</i> perusahaan i pada tahun t <i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i>	berganda • Statistik Deskriptif • Uji normalitas • Uji Statistik t	1) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, 2) kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, 3) <i>tax avoidance</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 4) Komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 5) Komisaris independen melalui <i>tax avoidance</i> secara tidak langsung tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan tabel ringkasan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu variabel dependen yang digunakan yaitu manajemen laba, metode penelitian yang digunakan beberapa peneliti sebelumnya yaitu persamaan analisis regresi linear berganda. Kemudian

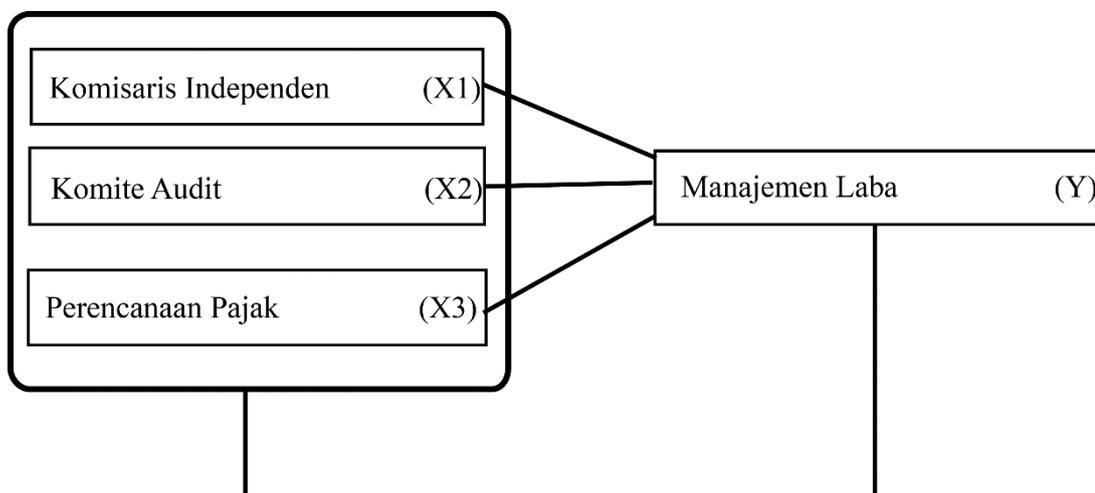
variabel independen yang digunakan yaitu perencanaan pajak dan *good corporate governance* yang menggunakan proksi komite audit dan komisaris independen.

Table 2.2
Matriks Penelitian Sebelumnya

	Manajemen Laba	
	Berpengaruh	Tidak berpengaruh
<i>Good Corporate Governance</i>	Viola Syukrina E Janros dan Joyce Lim (2019), Selvy Yulita Abdillah dan R. Anastasia Endang Susilawati Nanang Purwanto (2019), Sinaga Dan Doharman (2018).	Setyarso Herlambang (2018), Luh Made Dwi Parama Yogi dan I Gusti Ayu Eka Damayanthi (2016).
Perencanaan Pajak	A.A Gede Raka Plasa Negara dan I.D.G. Dharma Suputra (2017), Santana dan Wirakusuma (2016).	Dewi Kusuma Wardani dan Desifa Kurnia Santi (2018), Fatchan Achyani dan Susi Lestari (2019), Friscasyllia Lavenia Lolana, Susi Dwimulyani (2019).

2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menggunakan *Good Corporate Governance* sebagai variabel independen yang diproksikan sebagai komisaris independen (X1) dan komite audit (X2), perencanaan pajak sebagai variabel independen (X3) yang diduga mempengaruhi Manajemen laba sebagai variabel dependen (Y). Kerangka pemikiran teoritis tersebut dituangkan dalam model penelitian seperti di tunjukan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran.

1. Pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba

Menurut Fadillah (2017) Komisaris independen didefinisikan sebagai “seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dengan dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik”.

Dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan sangatlah penting dan berpengaruh dalam meminimalisir manajemen laba didalam perusahaan, dimana semakin tinggi tingkat komisaris independen dalam perusahaan semakin baik untuk mengawasi manajer dalam melakukan tindak kecurangan, sebaliknya apabila semakin sedikit tingkat dewan komisaris independen dalam perusahaan semakin lemah pula pengawasan terhadap praktek kecurangan yang dilakukan manajer (Amelia dan Hernawati, 2016). Komisaris independen memiliki peran pengawasan terhadap keuangan yang dilaporkan oleh manajemen didalam laporan keuangan untuk para pemegang kepentingan agar tidak terjadinya kecurangan atau memanipulasi laporan keuangan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Selvy Yulita Abdillah dan R. Anastasia Endang Susilawati Nanang Purwanto (2019) mengatakan bahwa komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Dan Septiana Ratna Sari dan Nur Fadrijh Asyik (2013) mengatakan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh komite audit terhadap manajemen laba

Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. Keberadaan komite audit bermanfaat dalam menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan bagi *stakeholder*, dan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen. Perdana (2019) mengatakan bahwa apabila semakin banyak jumlah rapat komite audit yang diadakan, maka akan mampu mengurangi tindakan manajemen laba.

Rapat komite audit yang secara rutin dilakukan akan meningkatkan fungsi monitoring terhadap manajemen. Adanya pengawasan yang semakin ketat maka manajemen akan kehilangan kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan curang terkait dengan laporan keuangan. Menurut (Widasari dan Isgiyarta, 2017) perusahaan yang mengadakan rapat komite audit minimal 4 kali dalam setahun dapat mencegah terjadinya praktik manajemen laba. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa komite audit yang melakukan pertemuan secara teratur akan menjadi pengawas yang lebih baik dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Komite audit yang efektif diperlukan dalam pencapaian *Good Corporate Governance*, Ada beberapa manfaat dari pembentukan komite audit dalam perusahaan pertama, komite audit melakukan pengawasan laporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal. Kedua, komite audit

melakukan pengawasan independen terhadap pengelolaan perusahaan. Ketiga, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan yang baik dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi manajemen laba (Abdillah, dkk, 2019).

Penelitian terdahulu telah membuktikan peran komite audit dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Septiana Ratna Sari dan Nur Fadrijh Asyik (2013) Komite Audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Selvy Yulita Abdillah dan R. Anastasia Endang Susilawati Nanang Purwanto Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negative terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya ukuran komite audit dapat meminimalisir terjadinya manajemen laba.

3. Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

Perencanaan pajak dapat berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena dengan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan dapat memperoleh laba bersih yang rasional dan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan perencanaan pajak. Secara ekonomis, pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Teori penghubung perencanaan pajak terhadap manajemen laba menurut Pohan (2016) “perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal sebelum perusahaan melakukan pembayaran pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Perusahaan selalu menginginkan jumlah biaya yang menjadi tanggungannya kecil agar perusahaan bisa memperoleh laba usaha yang tinggi. Laba usaha yang tinggi akan menguntungkan pemilik perusahaan, manajer sebagai pihak yang bertanggungjawab mengupayakan laba yang tinggi untuk mendapatkan berbagai bonus yang ditawarkan pemilik perusahaan jika manajer mampu mencapai target yang diharapkan (Achyani dan Lestari, 2019). Perencanaan pajak dilakukan dengan berbagai cara agar pembayaran pajak mampu ditekan seminimal mungkin sehingga laba perusahaan dapat meningkat, cara yang ditempuh manajer untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut merupakan tindakan manajemen laba (Achyani dan Lestari, 2019: 79).

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Santana dan Wirakusuma (2016) menyatakan bahwa, perencanaan pajak memiliki pengaruh positif, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan praktek manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Desifa Kurnia Santi (2018) menyatakan bahwa *Tax planning* (perencanaan pajak) tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

4. Pengaruh *good corporate governance* dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

Menurut Franita (2018) pengertian *good corporate governance* adalah “suatu system yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* yang meliputi karyawan, kreditur, dan masyarakat”.

Menurut Sumarsan (2017), “Perencanaan pajak merupakan proses perencanaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha untuk menganalisis dan memanfaatkan celah ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak seminimal mungkin pada masa pajak kini dan masa pajak yang akan datang”.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Sri Mulyati dan Apollo (2019) menyatakan bahwa, Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa profitabilitas (X1), perencanaan pajak (X2), tata kelola perusahaan yang baik (X3) memiliki berpengaruh sama terhadap manajemen laba (Y), sedangkan secara parsial hanya *tax planning* (X2) yang tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (Y).

2.6 Hipotesis penelitian

Berdasarkan berbagai pembahasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- H₁: *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap manajemen laba.
- H₂: Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.
- H₃: *Good Corporate governance* dan perencanaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian verifikatif dengan metode *explanatory survey*. Metode penelitian *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Pada penelitian ini, penulis meneliti pengaruh *Good corporate governance* dan perencanaan pajak terhadap Manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian variabel X adalah *good corporate governance* dan perencanaan pajak sedangkan untuk variabel Y adalah manajemen laba. Indikator yang digunakan untuk masing-masing variabel diantaranya variabel X *good corporate governance* diukur menggunakan indikator komisaris independen dan komite audit, perencanaan pajak diukur menggunakan indikator *Tax Retention Rate (TRR)*, sedangkan untuk variabel Y yaitu manajemen laba.

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan adalah *organization*, karena penelitian ini mengenai suatu organisasi perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman sehingga data adalah mengenai atau berasal dari (*respons*) suatu organisasi tertentu.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai lokasi untuk melakukan observasi. Untuk beberapa perusahaan yang data laporan keuangannya tidak lengkap atau tidak tercantum dalam situs www.idx.co.id, penulis memperolehnya dari situs atau website perusahaan-perusahaan yang menjadi objek penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif yaitu mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan volume yang berupa angka-angka. Penulis akan menggunakan data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyedia seperti: media massa, perusahaan penyedia data, bursa efek, data yang digunakan peneliti dalam penelitian sebelumnya, data yang disediakan pada *statistic software*,

dsb. Jenis data yang digunakan adalah data dokumen yang berupa laporan keuangan dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang diterbitkan oleh perusahaan yang listed di BEI selama periode 2016-2019. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari website BEI (www.idx.co.id) serta website personal perusahaan yang akan diteliti. Data lainnya diperoleh dari studi pustaka dan menelaah penelitian sebelumnya

3.4 Operasional Variabel

Variabel operasional adalah sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai yang ditetapkan dalam suatu penelitian. Untuk memudahkan proses analisa, maka penulis akan mengklasifikasikan variabel-variabel kedalam dua kelompok, yaitu:

1. Variabel Dependen (Variabel Terkait)

Variabel dependen yaitu variabel yang dijelaskan atau yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel yang diduga sebagai akibat. Besarnya perubahan yang disebabkan oleh variabel independen ini akan memberi peluang terhadap perubahan variabel dependen (terikat) sebesar koefisien perubahan dalam variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah manajemen laba yang diukur dengan menggunakan model *Scaled Earning Changes*.

2. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain atau variabel yang diduga sebagai akibat. Setiap terjadi perubahan terhadap variabel independen, maka variabel dependen dapat terpengaruhi atas perubahan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah *good corporate governance* dan perencanaan pajak. *Good corporate governance* diukur dengan menggunakan proksi komisaris independen dan komite audit, dan perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rasio *Tax Retention Rate (TRR)*.

Tabel 3.1

Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya
Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020)

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Variabel Independen				
<i>Good Corporate governance</i> (Independen Variabel/X)	Komisaris Independen (x1)	- Jumlah dewan komisaris independen - Jumlah seluruh dewan komisaris	Komisaris Independen = $\frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$	Rasio
	Komite Audit (x2)	- Jumlah komite audit	Komite Audit = Jumlah anggota komite audit perusahaan	Rasio

Perencanaan Pajak	<i>Tax Retention Rate</i>	- Laba Bersih - Laba Sebelum Pajak	$TRR = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100$	Rasio
Variabel Dependen				
Manajemen Laba	<i>Scaled Earning Changes</i>	1. Scaled Earning Changes 2. Laba Bersih 3. Market Value equity	$Scaled\ Earning\ Changes\ it = \frac{Net\ Income\ it - Net\ Income\ i(t-1)}{Market\ Value\ Equity\ i(t-1)}$ $MVE\ i(t-1) = \text{Saham yang Beredar} \times \text{Harga Saham}$	Rasio

3.5 Metode Penarikan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling (non random sampling)* yaitu dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan tahunan selama periode 2016-2020.
- 2) Perusahaan yang tidak rugi selama periode 2016 – 2020.
- 3) Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang memiliki laporan komite audit dan komisaris independen.
- 4) Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya yang dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Tabel 3.2
Kriteria pengambilan sampel penelitian

Keterangan	Jumlah Sampel Perusahaan
Perusahaan sektor makanan dan minuman yang listing berturut-turut periode 2016-2020.	31
Perusahaan menggunakan mata uang selain rupiah selama periode pengamatan.	0
Perusahaan delisting selama tahun pengamatan	0
Laporan keuangan perusahaan periode 2016-2020 yang tidak dapat diakses secara lengkap	16
Jumlah Perusahaan yang Diteliti	12

Sumber: Data sekunder yang diperoleh

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka sebanyak 12 perusahaan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 3.3

Nama-nama perusahaan yang menjadi Objek Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADES	PT. Akasha Wira International Tbk
2	DLTE	PT. Delta Djakarta Tbk
3	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
4	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
5	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk
6	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
7	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
8	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk
9	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk
10	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
11	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk
12	STTP	PT. Siantar Top Tbk

3.6 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode sampling diatas, maka penulis menggunakan teknik observasi dokumentasi dengan melihat dan mengunduh laporan keuangan tersebut untuk periode 2016-2020, perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang dipublikasikan oleh perusahaan sampel melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), web-web resmi perusahaan sampel, www.idnfinancials.com dan dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik media cetak maupun elektronik dalam memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis. Pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, koran, majalah dan sebagainya.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan mengenai variabel penelitian kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Purwanto Sulistyawati (2017), model regresi berganda dikembangkan untuk melakukan estimasi atau prediksi nilai variabel dependen (Y) dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen (x_1, x_2, x_3 dst). Analisis ini berfungsi untuk melihat hubungan linier antara satu variabel atau lebih yang diidentifikasi sebagai variabel independen atau variabel bebas dengan satu variabel lain sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Persamaan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Keterangan:

Y = Manajemen Laba

A = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi untuk Komisararis Independen

x_1 = Komisararis Independen

b_2 = Koefisien regresi untuk Komite Audit

x_2 = Komite Audit

b_3 = Koefisien regresi untuk Perencanaan pajak Komite Audit

x_3 = Perencanaan pajak

Dalam mengolah data penelitian, peneliti menggunakan aplikasi *Statistic Product Service Solution* (SPSS) versi 25. Program ini banyak penggunaannya dan sangat populer baik untuk penelitian umum, skripsi, desertasi, tesis, dan sebagainya.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Pengertian statistik deskriptif menurut (Sugiyono, 2018 : 147) adalah “Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.” Model ini memberikan informasi berupa data statistik yang akan digunakan untuk pengujian dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari sampel.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan guna menguji kualitas data penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel dependen maupun independen atau keduanya terdistribusi secara normal atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali, 2016).

- a. Analisis grafik, Salah satu cara yang mudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian, dengan hanya melihat tabel histogram bisa menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.
- b. Analisis statistik, Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) tingkat signifikansi (α) 0.05. Level *of-significant* yang digunakan adalah 0,05. Jika melalui *p-value* lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, begitupula sebaliknya.

2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik semestinya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Cara mendeteksi ada tidaknya Multikolonieritas yaitu dengan cara memperhatikan angka *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih dari 0,10 (Ghozali, 2016).

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada regresi antar kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah korelasi. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji *Durbin Watson* (DW). Untuk pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model dapat digunakan patokan nilai dari DW hitung mendekati angka 2. Jika nilai DW hitung mendekati atau sekitar 2 maka model tersebut terbebas dari asumsi klasik autokorelasi (Ghozali, 2016). Kriteria pengambilan keputusan pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai DW antara 0 sampai 1,5 berarti terdapat autokorelasi positif.
- 2) Nilai DW antara 1,5 sampai 2,5 berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Nilai DW antara 2,5 sampai 4 berarti terdapat autokorelasi negatif.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heterokedastisitas menggunakan uji Glejser. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya, jika nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.7.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui kebenaran dari dugaan sementara. Hipotesis pada dasarnya diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2018 : 159). Analisis *goodness of fit* model digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Secara statistik, setidaknya pengukuran dari analisis ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t (Ghozali, 2016). Perhitungan statistik

disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

1. Uji Statistik F (Secara Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui variabel-variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen digunakan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ atau 5%. Hasil uji F pada SPSS dapat dilihat dari tabel ANOVA yang menunjukkan variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen jika p – value (kolom Sig) \leq level of signifikan yang ditentukan.

2. Uji statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, atau:

$$H_0: \beta_i = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_0: \beta_i \neq 0$$

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- 1) H_0 diterima atau H_A ditolak apabila signifikan t hitung $> 0,05$ artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, bila dilakukan uji parsial
- 2) H_0 ditolak atau H_A diterima apabila signifikan t hitung $< 0,05$ artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, bila dilakukan uji secara parsial.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan modal dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan-kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini merupakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Penulis mendapatkan data dan informasi melalui *website* BEI yaitu www.idx.co.id dan *website* perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang meliputi komisaris independen, komite audit, dan perencanaan pajak, serta pengaruhnya terhadap manajemen laba.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terhadap perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020. Berdasarkan pada data yang diperoleh dari www.sahamok.com bahwa perusahaan sub sektor makanan dan minuman terdapat 31 perusahaan yang telah terdaftar di BEI. Berdasarkan pada metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengambilan sampel non acak dengan jenis *purposive sampling* atau memberikan kriteria tertentu, maka perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebanyak 12 perusahaan sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Daftar Sampel yang Memenuhi Kriteria

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADES	PT. Akasha Wira International Tbk
2	DLTA	PT. Delta Jakarta Tbk
3	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
4	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
5	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk
6	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
7	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
8	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk
9	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk
10	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
11	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk
12	STTP	PT. Siantar Top Tbk

(Sumber: www.sahamok.com, diolah oleh peneliti, 2022)

Total perusahaan sektor makanan dan minuman yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 perusahaan. Berikut profil perusahaan-perusahaan tersebut adalah:

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI

1. Profil PT. Akasha Wira International Tbk

Akasha Wira International Tbk (dahulu Ades Waters Indonesia Tbk) (ADES) didirikan dengan nama PT Alfindo Putrasetia pada tahun 1985 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1986. Kantor pusat Akasha Wira International Tbk berlokasi di Perkantoran Hijau Arkadia Tower C, Lantai 15, Jl. Letjend. T.B. Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520 – Indonesia. Pemegang saham mayoritas Akasha Wira International Tbk (30-Apr-2022) adalah Water Partners Bottling S.A. (91,52%), merupakan perusahaan joint venture antara The Coca Cola Company dan Nestle S.A. kemudian pada tanggal 3 Juni 2008, Water Partners Bottling S.A. diakuisisi oleh Sofos Pte. Ltd., perusahaan berbadan hukum Singapura, dengan akuisisi tersebut Sofos Pte. Ltd menjadi pemegang saham pengendalian Perseroan. Pada tanggal 2 Mei 1994, ADES memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) ADES kepada masyarakat sebanyak 15.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham, dengan harga penawaran perdana Rp3.850,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 13 Juni 1994.

2. Profil PT. Delta Djakarta Tbk

Delta Djakarta Tbk (DLTA) didirikan tanggal 15 Juni 1970 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1933. Kantor pusat Delta Djakarta Tbk dan pabriknya berlokasi di Jalan Inspeksi Tarum Barat, Bekasi Timur, Jawa Barat 17510 – Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Delta Djakarta Tbk (31-Mei-2022), yaitu: San Miguel Malaysia (L) Pte. Ltd (pengendali) (58,33%) dan Pemda DKI Jakarta (26,25%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan DLTA yaitu terutama untuk melakukan kegiatan usaha industri minuman beralkohol dari malt seperti bir, ale, porter dan stout, termasuk industri bir beralkohol rendah atau tanpa alkohol. Saat ini, kegiatan usaha DLTA adalah melakukan produksi dan distribusi bir pilsener dan bir hitam dengan merek Anker Bir, Anker Stout, Anker Lychee, Carlsberg, San Miguel Pale Pilsen, San Mig Light, San Miguel Cerveza Negra, Kuda Putih dan Batavia. Pada tahun 1984, DLTA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham DLTA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 347.400 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp2.950,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 27 Februari 1984.

3. Profil PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) didirikan 02 September 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1 Oktober 2009. ICBP merupakan hasil pengalihan kegiatan usaha Divisi Mi Instan dan Divisi Penyedap Indofood

Sukses Makmur Tbk (INDF), pemegang saham pengendali. Kantor pusat Indofood CBP berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 76-78, Jakarta 12910 – Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (28-Feb-2022), yaitu: Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), dengan persentase kepemilikan sebesar 80,53%. Pada tanggal 24 September 2010, ICBP memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ICBP (IPO) kepada masyarakat sebanyak 1.166.191.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp5.395,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 07 Oktober 2010.

4. Profil PT. Indofood Sukses Makmur Tbk

Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) didirikan tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. Kantor pusat Indofood berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 – 78, Jakarta 12910 – Indonesia. Sedangkan pabrik dan perkebunan Indofood, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi berlokasi di berbagai tempat di Indonesia, antara lain, di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan di luar negeri, antara lain Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Turki, Kenya, Maroko, Serbia, Nigeria dan Ghana. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Indofood Sukses Makmur Tbk (28-Feb-2022) adalah First Pacific Investment Management Limited, dengan persentase kepemilikan sebesar 50,07%. Pada tahun 1994, INDF memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham INDF (IPO) kepada masyarakat sebanyak 21.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp6.200,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 14 Juli 1994.

5. Profil PT. Mayora Indah Tbk

Mayora Indah Tbk (MYOR) didirikan 17 Februari 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1978. Kantor pusat Mayora Indah Tbk berlokasi di Gedung Mayora lantai 8, Jl. Tomang Raya 21-23, Jakarta 11440 – Indonesia, dan pabrik terletak di Tangerang dan Bekasi. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Mayora Indah Tbk (31-Mei-2022), yaitu PT Unita Branindo (32,93%), PT Mayora Dhana Utama (26,14%) dan Jogi Hendra Atmadja (25,24%). Pada tanggal 25 Mei 1990, MYOR memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham MYOR (IPO) kepada masyarakat sebanyak 3.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp9.300,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 04 Juli 1990.

6. Profil PT. Multi Bintang Indonesia Tbk

Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) didirikan 03 Juni 1929 dengan nama N.V. Nederlandsch Indische Bierbrouwerijen dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1929. Kantor pusat MLBI berlokasi di Talavera Office Park Lantai 20, Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430, sedangkan pabrik berlokasi di Jln. Daan Mogot Km.19, Tangerang 15122 dan Jl. Raya Mojosari – Pacet KM. 50, Sampang Agung, Jawa Timur. Pemegang saham yang memiliki 5 % atau lebih saham Multi Bintang Indonesia Tbk adalah Heineken International BV (pengendali) (81,78%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan MLBI beroperasi dalam industri bir dan minuman lainnya. Saat ini, kegiatan utama MLBI adalah memproduksi dan memasarkan bir (Bintang dan Heineken), bir bebas alkohol (Bintang Zero) dan minuman ringan berkarbonasi (Green Sands). Pada tahun 1981, MLBI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham MLBI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 3.520.012 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp1.570,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 15 Desember 1981.

7. Profil PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk

Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) (Sari Roti) didirikan 08 Maret 1995 dengan nama PT Nippon Indosari Corporation dan mulai beroperasi komersial pada tahun 1996. Kantor pusat dan salah satu pabrik ROTI berkedudukan di Kawasan Industri MM 2100 Jl. Selayar blok A9, Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Bekasi 17530, Jawa Barat – Indonesia. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup usaha ROTI bergerak di bidang pabrikasi, penjualan dan distribusi roti dan minuman, termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya serta segala jenis minuman ringan, termasuk tetapi tidak terbatas pada minuman sari buah, minuman berbahan dasar susu dan minuman lainnya. Saat ini, kegiatan usaha utama ROTI adalah pabrikasi, penjualan dan distribusi roti (roti tawar, roti manis, roti berlapis, cake dan bread crumb) dengan merek “Sari Roti”. Pada tanggal 18 Juni 2010, ROTI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ROTI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 151.854.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp1.250,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 28 Juni 2010.

8. Profil PT. Sekar Bumi Tbk

Sekar Bumi Tbk (SKBM) didirikan 12 April 1973 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1974. Kantor pusat SKBM berlokasi di Plaza Asia, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190 – Indonesia dan pabrik berlokasi di Jalan Jenggolo 2 No. 17 Waru, Sidoarjo serta tambak di Bone dan Mare, Sulawesi. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SKBM adalah

dalam bidang usaha pengolahan hasil perikanan laut dan darat, hasil bumi dan peternakan. Sekar Bumi memiliki 2 divisi usaha, yaitu hasil laut beku nilai tambah (udang, ikan, cumi-cumi, dan banyak lainnya) dan makanan olahan beku (dim sum, udang berlapis tepung roti, bakso seafood, sosis, dan banyak lainnya). Selain itu, melalui anak usahanya, Sekar Bumi memproduksi pakan ikan, pakan udang, mete dan produk kacang lainnya. Produk-produk Sekar Bumi dipasarkan dengan berbagai merek, diantaranya SKB, Bumifood dan Mitraku. Tanggal 18 September 1995, SKBM memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham SKBM (IPO) kepada masyarakat. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 05 Januari 1993. Kemudian sejak tanggal 15 September 1999, saham PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) dihapus dari daftar Efek Jakarta oleh PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia / BEI).

9. Profil PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) didirikan tanggal 2 Nopember 1971 dan mulai beroperasi secara komersial pada awal tahun 1974. Kantor pusat dan pabrik Ultrajaya berlokasi di Jl. Raya Cimareme 131 Padalarang, Bandung 40552 – Indonesia. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Ultrajaya bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman. Di bidang minuman Ultrajaya memproduksi minuman seperti susu cair, sari buah, teh, minuman tradisional dan minuman kesehatan, yang diolah dengan teknologi UHT (Ultra High Temperature) dan dikemas dalam kemasan karton aseptik. Di bidang makanan Ultrajaya memproduksi susu kental manis, susu bubuk dan konsentrat buah-buahan tropis. Perusahaan memasarkan produknya dengan penjualan langsung, penjualan tidak langsung dan melalui pasar modern. Pada tanggal 15 Mei 1990, ULTJ memperoleh ijin Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ULTJ (IPO) kepada masyarakat sebanyak 6.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp7.500,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 2 Juli 1990.

10. Profil PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk

Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (sebelumnya Cahaya Kalbar Tbk) (CEKA) didirikan 03 Februari 1968 dengan nama CV Tjahaja Kalbar dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1971. Kantor pusat Wilmar Cahaya Indonesia Tbk terletak di Kawasan Industri Jababeka II, Jl. Industri Selatan 3 Blok GG No.1, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 17532 – Indonesia, sedangkan lokasi pabrik terletak di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat dan Pontianak, Kalimantan Barat. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (30-Apr-2022), adalah PT Sentratama Niaga Indonesia (pengendali), dengan persentase kepemilikan sebesar 87,02%. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk merupakan

perusahaan dibawah Grup Wilmar International Limited. Wilmar International Limited adalah sebuah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Singapura. Pada 10 Juni 1996, CEKA memperoleh pernyataan efektif dari Menteri Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham CEKA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 34.000.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp1.100,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 09 Juli 1996.

11. Profil PT. Budi Starch & Sweetener Tbk

Budi Starch & Sweetener Tbk (sebelumnya Budi Acid Jaya Tbk) (BUDI) didirikan 15 Januari 1979 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 1981. Kantor pusat Budi Starch & Sweetener Tbk berlokasi di Wisma Budi lantai 8-9, Jalan HR. Rasuna Said Kav C-6, Jakarta 12940 – Indonesia, sedangkan lokasi pabrik BUDI di Subang, Lampung, Madiun, Surabaya, Makasar dan Ponorogo. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Budi Starch & Sweetener Tbk (30-Apr-2022), yaitu: PT Budi Delta Swakarya (32,26%) dan PT Sungai Budi (26,70%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BUDI adalah bergerak di bidang perindustrian, pertanian, pengadaan listrik, gas dan uap, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, perdagangan besar dan eceran, pengangkutan dan pergudangan. Kegiatan utama Budi Starch & Sweetener bergerak dalam pembuatan dan penjualan tepung tapioka, sweeteners (glukosa, fruktosa dan maltodextrin), karung plastik, asam sulfat dan bahan-bahan kimia lainnya. Pada tanggal 31 Maret 1995, BUDI memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BUDI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 30.000.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp3.000,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 08 Mei 1995.

12. Profil PT. Siantar Top Tbk

Siantar Top Tbk (STTP) didirikan tanggal 12 Mei 1987 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 1989. Kantor pusat Siantar Top beralamat di Jl. Tambak Sawah No. 21-23 Waru, Sidoarjo, dengan pabrik berlokasi di Sidoarjo (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Bekasi (Jawa Barat) dan Makassar (Sulawesi Selatan). Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Siantar Top Tbk (31-Des-2021) adalah PT Shindo Tiara Tunggal, dengan persentase kepemilikan sebesar 56,76%. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Siantar Top terutama bergerak dalam bidang industri makanan ringan, yaitu Camilan (Snack, dengan merek French Fries 2000, Twistko, Tictic dan Mister), Biskuit dan Wafer (Biscuit and Wafer – Goriorio, Gopotato, Go Malkist dan Go), Mie Camilan (Snack Noodle – Soba, Spix Mie Goreng, Mie Gemes, Gemes Enaak dan Suki), Mie Instan (Instant Noodle – Jaya Mie), Kopi (Coffee – O’Krimmer dan Maestro), bihun (vermicelli – Bihun Jago Idola) dan kembang gula (candy – DR.

Milk, Gaul, Mango dan Era Cool). Selain itu, STTP juga menjalankan usaha percetakan melalui anak usaha (PT Siantar Megah Jaya). Pada tanggal 25 Nopember 1996, STTP memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham STTP (IPO) kepada masyarakat sebanyak 27.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dan harga penawaran Rp2.200,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 Desember 1996.

4.1.2. Perkembangan Data Komisaris Independen, Komite Audit, Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Periode Tahun 2016–2020

1. Perkembangan Data Komisaris Independen Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Periode Tahun 2016–2020

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang senantiasa dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Semakin tinggi persentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan semakin tinggi. Komisaris independen dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Berikut data persentase Komisaris Independen pada 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.

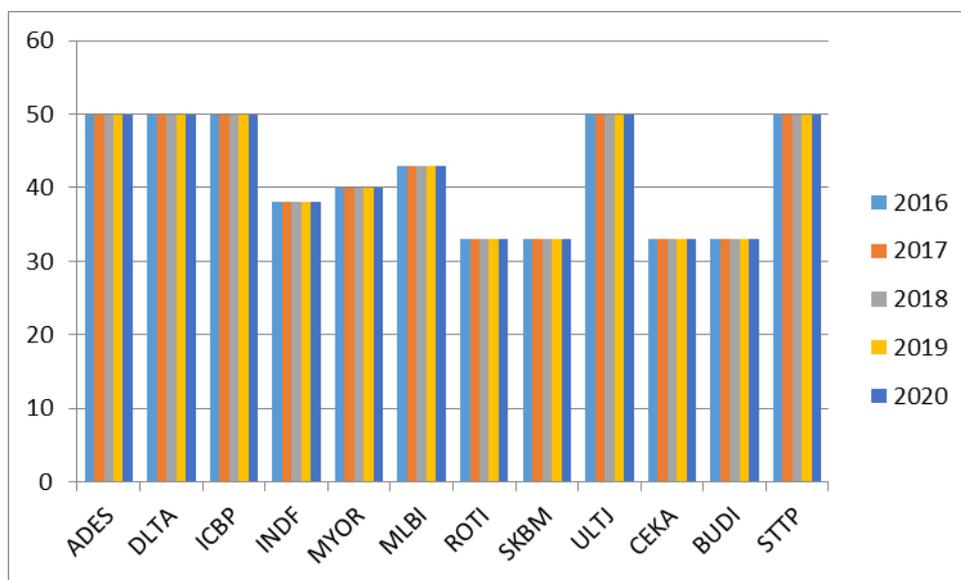
Tabel 4.2

Data persentase Komisaris Independen pada 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020

No	KODE	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
1	ADES	50	50	50	50	50	50
2	DLTA	50	50	50	50	50	50
3	ICBP	50	50	50	50	50	50
4	INDF	38	38	38	38	38	38
5	MYOR	40	40	40	40	40	40
6	MLBI	43	43	43	43	43	43
7	ROTI	33	33	33	33	33	33
8	SKBM	33	33	33	33	33	33
9	ULTJ	50	50	50	50	50	50
10	CEKA	33	33	33	33	33	33
11	BUDI	33	33	33	33	33	33

No	KODE	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
12	STTP	50	50	50	50	50	50
	Rata-rata	42	42	42	42	42	

Sumber: data sekunder diolah Tahun 2022



Gambar 4.1

Data persentase Komisaris Independen pada 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, tahun 2016-2020 persentase dewan komisaris independen tertinggi dimiliki oleh ADES, DLTA, ICBP, ULTI dan STTP yaitu sebesar 50%, selanjutnya persentase terendah pada perusahaan dengan kode CEKA, dan BUDI sebesar 33% yang melebihi standar yang ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 untuk jumlah minimum komisaris independen di dalam perusahaan yaitu 30%. Rata-rata komisaris independen pada tahun 2016-2020 adalah 42%.

2. Perkembangan Data Komite Audit Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Periode Tahun 2016–2020

Menurut Ayu dan Septiani (2017: 5-6) Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk Dewan Komisaris yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan internal, memastikan keefektifitasan auditor internal dan auditor eksternal, serta memperkuat independensi auditor.

Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang ada dalam perusahaan. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

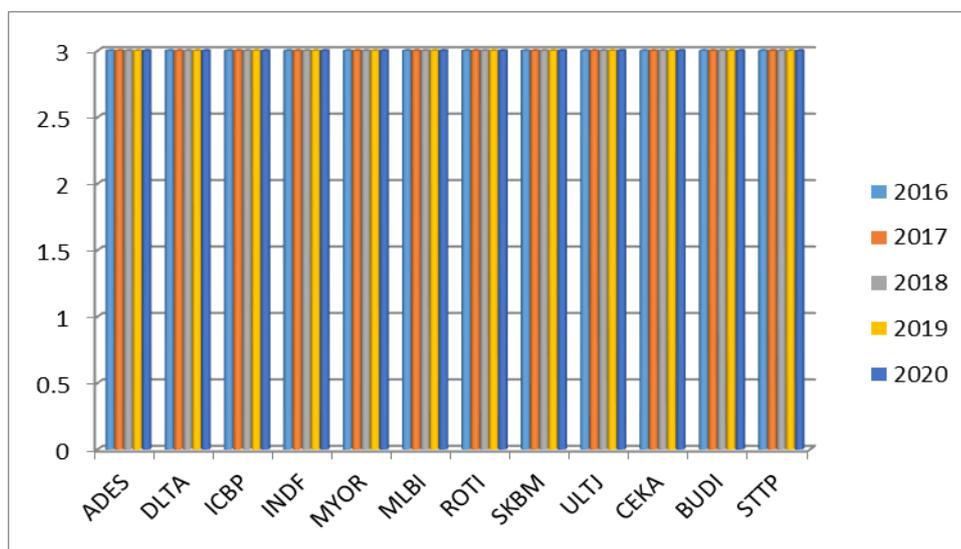
KA = Jumlah Anggota Komite Audit

Berikut data jumlah komite audit pada 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.

Tabel 4.3
Data Komite Audit pada 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020

No	KODE	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
1	ADES	3	3	3	3	3	3
2	DLTA	3	3	3	3	3	3
3	ICBP	3	3	3	3	3	3
4	INDF	3	3	3	3	3	3
5	MYOR	3	3	3	3	3	3
6	MLBI	3	3	3	3	3	3
7	ROTI	3	3	3	3	3	3
8	SKBM	3	3	3	3	3	3
9	ULTJ	3	3	3	3	3	3
10	CEKA	3	3	3	3	3	3
11	BUDI	3	3	3	3	3	3
12	STTP	3	3	3	3	3	3
	Rata-rata	3	3	3	3	3	

Sumber: data sekunder diolah Tahun 2022



Gambar 4.2

Data Komite Audit pada 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2016-2020 perusahaan makanan dan minuman memiliki jumlah komite pada 12 perusahaan

yang diteliti memiliki 3 komite audit dalam perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit sesuai dengan undang-undang dalam Pasal 4 Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Perkembangan Data Perencanaan Pajak Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Periode Tahun 2016–2020

Menurut Rustam dkk (2019 : 60) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Adapun rumus untuk mengukur perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{TRR} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

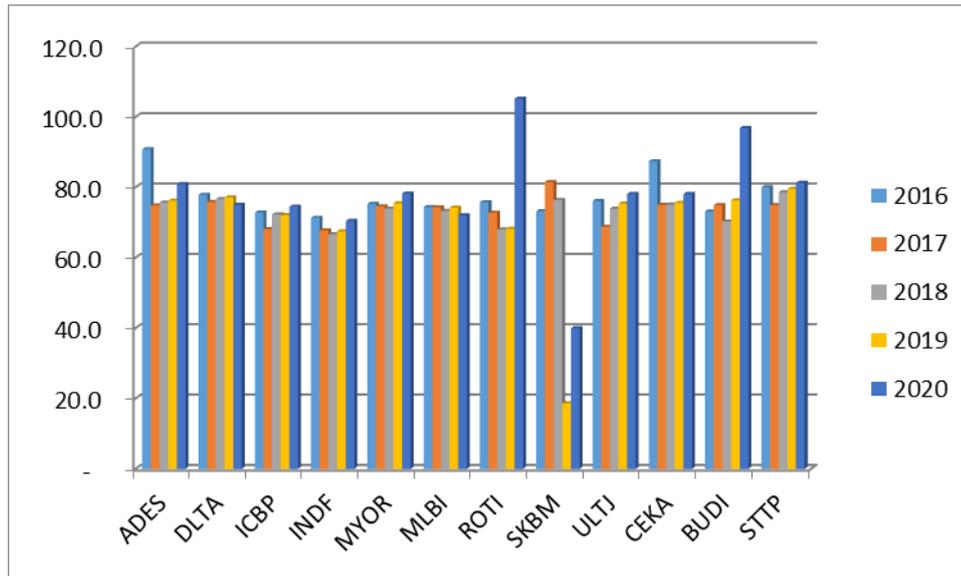
Berikut data persentase perencanaan pajak pada 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.

Tabel 4.4

Data Persentase Perencanaan Pajak pada 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020

No	KODE	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
1	ADES	90.8	74.8	75.6	76.1	80.9	79.6
2	DLTA	77.8	75.8	76.6	77.1	75.0	76.5
3	ICBP	72.8	68.1	72.3	72.1	74.5	71.9
4	INDF	71.3	67.7	66.6	67.5	70.4	68.7
5	MYOR	75.2	74.6	73.9	75.4	78.2	75.5
6	MLBI	74.4	74.3	73.3	74.1	72.0	73.6
7	ROTI	75.7	72.7	68.0	68.1	105.1	78.0
8	SKBM	73.2	81.5	76.4	18.5	39.9	57.9
9	ULTJ	76.1	68.7	73.9	75.3	78.1	74.4
10	CEKA	87.4	75.0	75.1	75.6	78.1	78.2
11	BUDI	73.1	74.9	70.3	76.3	96.8	78.3
12	STTP	80.0	74.9	78.6	79.5	81.3	78.8
	Rata-rata	77.3	73.6	73.4	69.6	77.5	74.3

Sumber: data sekunder diolah Tahun 2022



Gambar 4.3

Perkembangan Data Perencanaan Pajak Perusahaan Manufaktur
Sub Sektor Makanan Dan Minuman Periode Tahun 2016–2020

Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar 4.3, dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata penelitian perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2016-2020 adalah sebesar 74,3. Terdapat perusahaan yang memiliki rata-rata perencanaan pajak pada tahun 2016-2020 di atas rata-rata penelitian sebesar 74,3 yaitu perusahaan dengan kode emiten ADES, DLTA, MYOR, ROTI, ULTJ, CEKA, BUDI dan STTP. Sedangkan perusahaan ICBP, INDF, MLBI, dan SKBM, memiliki rata-rata perencanaan pajak di bawah rata-rata perusahaan. Rata-rata perencanaan pajak pertahun yang lebih rendah dari rata-rata penelitian yaitu terjadi pada tahun 2017, 2018, 2019, sedangkan pada tahun 2016, 2020 memiliki rata-rata perencanaan pajak yang di atas rata-rata penelitian.

Pada tahun 2016 rata-rata perencanaan pajak adalah sebesar 77,3. Perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak di atas nilai rata-rata pertahun adalah ADES, DLTA, CEKA dan STTP. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak di bawah nilai rata-rata pertahun adalah ICBP, INDF, MYOR, MLBI, ROTI, SKBM, ULTJ dan BUDI. Nilai perencanaan pajak yang paling tinggi pada tahun 2016 dimiliki oleh perusahaan ADES sebesar 90,8 dan nilai perencanaan pajak terendah dimiliki oleh perusahaan INDF sebesar 71,3.

Pada tahun 2017 rata-rata perencanaan pajak adalah sebesar 73,3. Perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak di atas nilai rata-rata pertahun adalah ADES, DLTA, MYOR, MLBI, SKBM, CEKA, BUDI dan STTP. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak di bawah nilai rata-rata pertahun adalah ICBP, INDF, ROTI, dan ULTJ. Nilai perencanaan pajak yang paling tinggi pada tahun 2017 dimiliki oleh perusahaan SLBM sebesar 81,5 dan nilai perencanaan pajak terendah dimiliki oleh perusahaan INDF sebesar 67,7.

Pada tahun 2018 rata-rata perencanaan pajak adalah sebesar 73,4. Perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak di atas nilai rata-rata pertahun adalah ADES, DLTA, MYOR, SKBM, CEKA, dan STTP. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak di bawah nilai rata-rata pertahun adalah ICBP, MLBI, ROTI, dan BUDI. Nilai perencanaan pajak yang paling tinggi pada tahun 2018 dimiliki oleh perusahaan STTP sebesar 78,6 dan nilai perencanaan pajak terendah dimiliki oleh perusahaan INDF sebesar 66,6.

Pada tahun 2019 rata-rata perencanaan pajak adalah sebesar 69,6. Perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak di atas nilai rata-rata pertahun adalah ADES, DLTA, ICBP, MYOR, MLBI, ULTJ, CEKA, BUDI dan STTP. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak di bawah nilai rata-rata pertahun adalah INDF, ROTI, dan SKBM. Nilai perencanaan pajak yang paling tinggi pada tahun 2019 dimiliki oleh perusahaan STTP sebesar 79,5 dan nilai perencanaan pajak terendah dimiliki oleh perusahaan SKBM sebesar 18,5.

Pada tahun 2020 rata-rata perencanaan pajak adalah sebesar 77,5. Perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak di atas nilai rata-rata pertahun adalah ADES, MYOR, ROTI, ULTJ, CEKA, BUDI dan STTP. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak di bawah nilai rata-rata pertahun adalah DLTA, INDF, MLBI dan SKBM. Nilai perencanaan pajak yang paling tinggi pada tahun 2019 dimiliki oleh perusahaan STTP sebesar 79,5 dan nilai perencanaan pajak terendah dimiliki oleh perusahaan SKBM sebesar 18,5.

4. Perkembangan Data Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Periode Tahun 2016–2020

Manajemen laba merupakan tindakan perekayasa laporan keuangan terutama untuk merekayasa laba perusahaan agar sesuai dengan yang diinginkan. Pada model ini lebih memfokuskan kepada elemen laba perusahaan. Pada model ini meneliti bagaimana perubahan laba suatu perusahaan yang dibandingkan dengan nilai pasar ekuitas perusahaan tersebut. Cara pengukuran menggunakan Scaled Earning Changes (SEC) yaitu dengan mengurangkan laba bersih tahun ini dengan laba bersih tahun sebelumnya yang kemudian dibagi dengan *Market Value of Equity* (MVE) tahun sebelumnya (Intan, 2018).

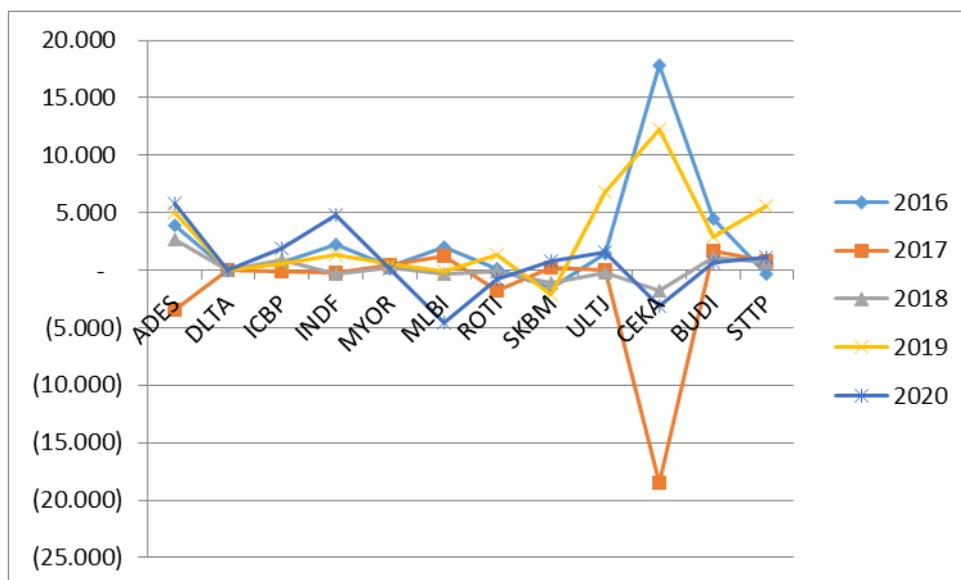
$$\text{Scaled Earnings Changes} = \frac{\text{Net Income } t - \text{Net Income } (t - 1)}{\text{MVE } (t - 1)}$$

Berikut data persentase manajemen laba pada 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.

Tabel 4.5
Data Persentase Manajemen Laba pada 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020

No	KODE	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
1	ADES	3.918	-3.392	2.712	5.017	5.827	2.82
2	DLTA	0.002	0.001	0.001	-0.000	-0.006	-0.00051
3	ICBP	0.708	-0.085	0.915	0.536	1.898	0.794482
4	INDF	2.238	-0.182	-0.280	1.356	4.755	1.577441
5	MYOR	0.332	0.477	0.221	0.609	0.090	0.345894
6	MLBI	1.960	1.180	-0.289	-0.058	-4.551	-0.35141
7	ROTI	0.093	-1.831	-0.110	1.360	-0.825	-0.26271
8	SKBM	-1.594	0.261	-1.128	-2.161	0.802	-0.76389
9	ULTJ	1.415	0.050	-0.258	6.787	1.539	1.906528
10	CEKA	17.821	-18.536	-1.805	12.249	-3.107	1.324296
11	BUDI	4.484	1.671	1.106	2.869	0.663	2.158654
12	STTP	-0.285	0.733	0.658	5.602	1.173	1.576348
	Rata-rata	2.591	-1.638	0.145	2.847	0.688	2.591

Sumber: data sekunder diolah Tahun 2022



Gambar 4.4

Perkembangan Data Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Periode Tahun 2016–2020

Berdasarkan tabel 4.5 dan gambar 4.4, dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata penelitian manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2016-2020 adalah sebesar 0,927. Terdapat perusahaan yang memiliki rata-rata manajemen laba pada tahun 2016-2020 di atas rata-rata penelitian sebesar 0,927 yaitu perusahaan dengan kode emiten ADES, INDF, BUDI dan STTP. Sedangkan perusahaan DLTA, ICBP, MYOR, MLBI, ROTI, dan SKBM, memiliki

rata-rata manajemen laba di bawah rata-rata perusahaan. Rata-rata manajemen laba pertahun yang lebih rendah dari rata-rata penelitian yaitu terjadi pada tahun 2017, 2018, 2020, sedangkan pada tahun 2016, 2019 memiliki rata-rata manajemen laba yang di atas rata-rata penelitian.

Pada tahun 2016 rata-rata manajemen laba adalah sebesar 2,591. Perusahaan yang memiliki nilai manajemen laba di atas nilai rata-rata pertahun adalah ADES, CEKA dan BUDI. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai manajemen laba di bawah nilai rata-rata pertahun adalah DLTA, ICBP, INDF, MYOR, MLBI, ROTI, SKBM, ULTJ, dan STTP. Nilai manajemen laba yang paling tinggi pada tahun 2016 dimiliki oleh perusahaan CEKA sebesar 17,821 dan nilai manajemen laba terendah dimiliki oleh perusahaan SKBM sebesar -1,594.

Pada tahun 2017 rata-rata manajemen laba adalah sebesar -1,638. Perusahaan yang memiliki nilai manajemen laba di atas nilai rata-rata pertahun adalah DLTA, MYOR, MLBI, SKBM, ULTJ, BUDI dan STTP. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai manajemen laba di bawah nilai rata-rata pertahun adalah ADES, ROTI, dan CEKA. Nilai manajemen laba yang paling tinggi pada tahun 2017 dimiliki oleh perusahaan BUDI sebesar 1,671 dan nilai manajemen laba terendah dimiliki oleh perusahaan CEKA sebesar 18,536.

Pada tahun 2018 rata-rata manajemen laba adalah sebesar 0,145. Perusahaan yang memiliki nilai manajemen laba di atas nilai rata-rata pertahun adalah ADES, ICBP, MYOR, BUDI, dan STTP. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai manajemen laba di bawah nilai rata-rata pertahun adalah DLTA, INDF, MLBI, ROTI, SKBM, ULTJ, dan CEKA. Nilai manajemen laba yang paling tinggi pada tahun 2018 dimiliki oleh perusahaan ADES sebesar 2,712 dan nilai manajemen laba terendah dimiliki oleh perusahaan CEKA sebesar -1,805.

Pada tahun 2019 rata-rata manajemen laba adalah sebesar 2,847. Perusahaan yang memiliki nilai manajemen laba di atas nilai rata-rata pertahun adalah ADES, ULTJ, CEKA, BUDI dan STTP. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai manajemen laba di bawah nilai rata-rata pertahun adalah DLTA, ICBP, INDF, MYOR, MLBI, ROTI, dan SKBM. Nilai manajemen laba yang paling tinggi pada tahun 2019 dimiliki oleh perusahaan CEKA sebesar 12,249 dan nilai manajemen laba terendah dimiliki oleh perusahaan SKBM sebesar -2,161.

Pada tahun 2020 rata-rata manajemen laba adalah sebesar 0,688. Perusahaan yang memiliki nilai manajemen laba di atas nilai rata-rata pertahun adalah ADES, ICBP, INDF, SKBM, ULTJ, dan STTP. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai manajemen laba di bawah nilai rata-rata pertahun adalah DLTA, MYOR, MLBI, ROTI, CEKA dan BUDI. Nilai manajemen laba yang paling tinggi pada tahun 2020 dimiliki oleh perusahaan ADES sebesar 5,827 dan nilai manajemen laba terendah dimiliki oleh perusahaan MLBI sebesar 4,551.

4.2. Analisis Data

Pengujian “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020)” dilakukan dengan pengujian statistik. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Statistical Product Service Solution* (SPSS) versi 25.0. Beberapa pengujian yang dilakukan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi) dan uji hipotesis (uji koefisien regresi secara parsial atau uji t, uji koefisien regresi secara bersama-sama atau uji F, uji koefisien determinasi).

Adapun variabel yang diteliti oleh penulis yaitu *good corporate governance* dengan menggunakan komisaris independen (X_1), komite audit (X_2), perencanaan pajak (X_3), dan manajemen laba (Y). Sebelum melakukan uji hipotesis dilakukan dulu uji normalitas data untuk memenuhi kriteria normalitas data dan untuk memenuhi data yang BLUE (*Best, Linier, Unbiased, Estimator*).

4.2.1. Statistik Deskriptif

Untuk menguji pengaruh *good corporate governance* dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba (pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2020), dilakukan dengan metode Statistik deskriptif yang menunjukkan ukuran statistik seperti nilai minimum, nilai maksimum, *mean* (rata-rata), *standar deviation* (simpangan baku). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan *Software Microsoft Excel 2016* dan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 25 untuk membantu dalam proses pengolahan data. Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	60	33.00	50.00	41.9167	7.50659
X2	60	3.00	3.00	3.0000	.00000
X3	60	18.50	105.10	74.2883	10.79551
Y	60	-18.54	17.82	.9327	4.23713
Valid N (listwise)	60				

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.6, $N = 60$ menggambarkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. Interpretasi dari hasil output *descriptive statistics* adalah sebagai berikut:

Variabel komisaris independen (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 33.00 pada perusahaan dengan kode ROTI, SKBM, CEKA dan BUDI, nilai maximum sebesar 50.00 pada perusahaan dengan kode ADES, DLTA, ICBP, ULTJ dan STTP, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 41.9167 dan *standar deviation* sebesar 7.50659.

Variabel komite audit (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 3.00, nilai maximum sebesar 3.00, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 3.0000 dan *standar deviation* sebesar 0.0000.

Variabel perencanaan pajak (X_3) memiliki nilai minimum sebesar 18.50 pada perusahaan dengan kode SKBM pada tahun 2019, nilai maximum sebesar 105.10 pada perusahaan ROTI pada tahun 2020, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 74.2883 dan *standar deviation* sebesar 10.79551.

Variabel manajemen laba (Y) memiliki nilai minimum sebesar -18.54 pada perusahaan dengan kode CEKA tahun 2017, nilai maximum sebesar 17.82 pada perusahaan dengan kode CEKA tahun 2016, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 0.9327 dan *standar deviation* sebesar 4.23713.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh model regresi dengan estimasi yang tepat dan tidak bias. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program statistik. Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh model regresi itu sendiri adalah residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas yang artinya antara variabel independen dalam model regresi tidak memiliki korelasi atau hubungan secara sempurna ataupun mendekati sempurna, tidak adanya heteroskedastisitas atau model regresi adalah homoskedastisitas yang artinya *variance* variabel independen dari satu pengamatan ke pengamatan lain adalah konstan atau sama dan tidak adanya autokorelasi (non-autokorelasi) yang artinya kesalahan pengganggu dalam model regresi tidak saling berkorelasi.

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Data yang terdistribusi secara normal berarti data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Distribusi normal data dengan bentuk distribusi normal dimana data memusat pada nilai rata-rata dan median.

Untuk mengetahui bentuk distribusi data dapat menggunakan grafik distribusi dan analisis statistik. Dalam penelitian ini menggunakan kedua cara tersebut. Analisis statistik merupakan cara yang dianggap lebih valid dengan menggunakan keruncingan kurva untuk mengetahui bentuk distribusi data. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). jika hasil *Kolmogrov Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal jika nilai signifikan lebih dari 0,05 (Sign. > 0,05). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7.

Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

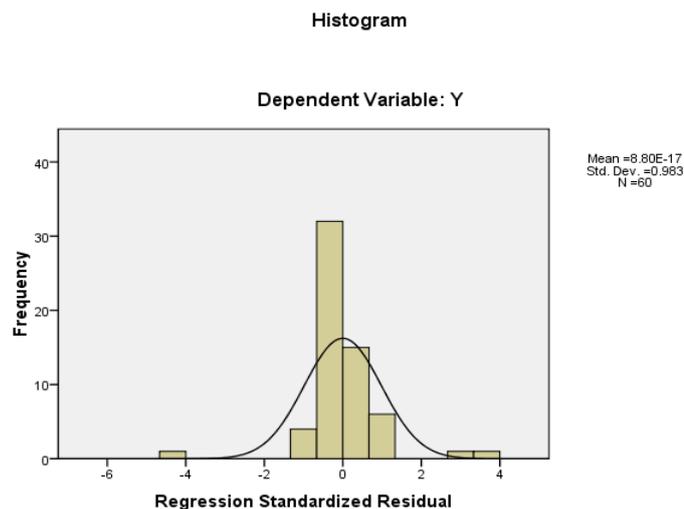
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.17407666
Most Extreme Differences	Absolute	.202
	Positive	.183
	Negative	-.202
Kolmogorov-Smirnov Z		1.562
Asymp. Sig. (2-tailed)		.115

a. Test distribution is Normal.

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, 2022)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai signifikan untuk data variabel komisariss independen (X_1), komite audit (X_2), perencanaan pajak (X_3), sebesar 0,115. Maka, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dimana data memiliki asymp. Sign. (2-tailed) yaitu 0,115 lebih besar dari 0,05 ($0,115 > 0,05$) maka nilai residual dari nilai uji tersebut telah normal.

Selanjutnya cara untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat histogram dan grafik P-Plot. Untuk melihat hasil uji normalitas dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar histogram sebagai berikut:



Gambar 4.5 Plot Histogram

Berdasarkan grafik Normal P-Plot tersebut dapat dilihat dari gambar histogram berbentuk lonceng, bahwa sebaran data dalam penelitian ini memiliki penyebaran dan distribusi mendekati normal, hal ini dikarenakan data yang sesungguhnya memusat mendekati garis diagonal Normal P-Plot. Artinya dapat disimpulkan data pada penelitian ini memiliki penyebaran dan pendistribusian mendekati normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* lebih kecil dari 0.01 atau sama dengan nilai VIF lebih besar dari 10. Jadi nilai VIF lebih tinggi dari 0,1 atau VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas (Santoso, 2017). Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8.
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3.655	1.772		2.062	.045		
KI	-2.645	.635	.567	-4.166	.021	.736	1.359
KA	-.473	.309	.180	2.532	.033	.983	1.017
Perencanaan Pajak	4.004	5.814	.684	4.989	.010	.725	1.379

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, nilai *tolerance* untuk variabel komisaris independen sebesar 0,736, nilai *tolerance* untuk variabel komite audit sebesar 0.983, nilai *tolerance* untuk variabel perencanaan pajak sebesar 0.725 sehingga nilai *tolerance* ketiga variabel independen diatas lebih dari 0,10 dan nilai VIF variabel komisaris independen sebesar 1,359, nilai VIF untuk variabel komite audit sebesar 1.017, nilai VIF untuk variabel perencanaan pajak sebesar 1.379, dimana nilai VIF ketiga variabel tersebut kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen diatas tidak terjadi masalah multikolonieritas pada model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan mengetahui dalam model regresi ada atau tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain. Menurut Priyanto (2017) menyatakan bahwa model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Berikut ini hasil uji autokorelasi dengan Durbin Watson dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9.
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.632 ^a	.400	.359	1.48284	1.712

a. Predictors: (Constant), KI, KA, Perencanaan Pajak

b. Dependent Variable: Manajemen Laba

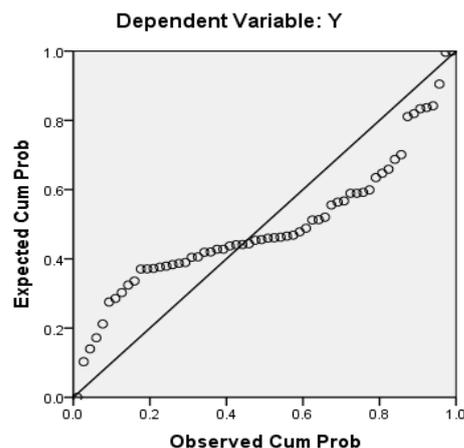
(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, 2022)

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji autokorelasi tersebut, diketahui nilai DW 1.712, selanjutnya nilai ini dibandingkan nilai tabel signifikansi 5%. Jumlah sampel $N = 60$ dan jumlah variabel independen 3 ($K=3$), maka diperoleh nilai $du = 1.6889$. Nilai DW (1.712) lebih besar dari batas atas (du) yakni 1.6889 sehingga hasil uji autokorelasi tersebut dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak mengalami masalah autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diperlukan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak mengenai data yang digunakan. Berikut merupakan grafik yang menjelaskan ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam penelitian.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.6.

Scatterplot Heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan SPSS 25. dapat diketahui bahwa plot atau titik-titik menyebar secara merata baik di atas garis nol, serta tidak menumpuk di satu titik sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji statistik ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas pada data penelitian.

4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen. Analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai dari

variabel dependen dengan nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antar variabel independen. Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10.
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3.655	1.772		2.062	.045		
KI	-2.645	.635	.567	-4.166	.021	.736	1.359
KA	-.473	.309	.180	2.532	.033	.983	1.017
Perencanaan Pajak	4.004	5.814	.684	4.989	.010	.725	1.379

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS versi 25, tahun 2022)

Berdasarkan tabel 4.10 maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e.$$

$$Y = -3,655 + -2,645X_1 + -0,473X_2 + 4,004X_3 + e.$$

Interpretasi dari regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) adalah -3,655 artinya jika komisaris independen, komite audit dan perencanaan pajak nilainya 0 maka manajemen laba nilainya negatif, yaitu -3,655.
2. Nilai koefisien regresi komisaris indepenen (b_1) bernilai negatif yaitu sebesar -2,645. Artinya bahwa setiap penurunan komite audit sebesar 1 satuan maka manajemen laba juga akan meningkat sebesar -2,645 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
3. Nilai koefisien regresi komite audit (b_2) bernilai negatif, yaitu sebesar -0,473, artinya bahwa setiap meningkat jumlah komite audit sebesar 1 satuan maka manajemen laba akan mengalami penurunan sebesar -0,473 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
4. Nilai koefisien regresi perencanaan pajak (b_3) bernilai positif, yaitu sebesar 4,004, artinya bahwa setiap peningkatan perencanaan pajak sebesar 1 satuan maka manajemen laba juga akan meningkat sebesar 4,004 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

4.2.4. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembuktian atas jawaban sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya.

1. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan *uji t-test*. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t (*t-test*) bertujuan untuk mengetahui bermakna atau tidaknya pengaruh *good corporate governance* dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba (pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode tahun 2016–2020). Pengujian hasil koefisien regresi secara parsial dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11.
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3.655	1.772		2.062	.045		
KI	-2.645	.635	.567	-4.166	.021	.736	1.359
KA	-.473	.309	.180	2.532	.033	.983	1.017
Perencanaan Pajak	4.004	5.814	.684	4.989	.010	.725	1.379

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS versi 25, tahun 2022)

Tabel distribusi dengan signifikan 0,05 dengan jumlah N = 60 maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

a. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil signifikan dalam tabel 4.11 variabel Komisaris Independen, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikan $< 0,05$ maka terdapat pengaruh yang signifikan, dan jika signifikan $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Untuk pengujian signifikansi peneliti menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Kriteria pengujiannya adalah H_0 diterima jika signifikansi $> 0,05$ dan H_0 ditolak jika signifikansi $< 0,05$. Untuk menentukan t_{tabel} dengan cara tingkat signifikansi $0,05 : 2 = 0,025$ (uji dilakukan dua sisi) dengan df (*degree of freedom*) atau derajat kebebasan dicari dengan rumus $n-k$ atau $60-2=58$, sehingga diperoleh $t_{tabel} = 2.002$. Pada tabel 4.11 tersebut dapat dilihat bahwa signifikan Komisaris Independen memiliki t_{hitung} sebesar -4.166 sehingga $-4.166 < 2.002$ dan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 ($0,021 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.

b. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil signifikan dalam tabel 4.11 variabel komite audit, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikan $< 0,05$ maka terdapat pengaruh yang signifikan, dan jika signifikan $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Untuk pengujian signifikansi peneliti menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Kriteria pengujiannya adalah H_0 diterima jika signifikansi $> 0,05$ dan H_0 ditolak jika signifikansi $< 0,05$. Untuk menentukan t_{tabel} dengan cara tingkat signifikansi $0,05 : 2 = 0,025$ (uji dilakukan dua sisi) dengan df (*degree of freedom*) atau derajat kebebasan dicari dengan rumus $n-k$ atau $60-2=58$, sehingga diperoleh $t_{tabel} = 2.002$. Pada tabel 4.11 tersebut dapat dilihat bahwa signifikan komite audit memiliki t_{hitung} sebesar 2.532 sehingga $2.532 > 2.002$ dan tingkat signifikansi kurang dari 0,05

($0,033 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh dan signifikan terhadap manajemen laba.

c. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil signifikan dalam tabel 4.11 variabel perencanaan pajak, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikan $< 0,05$ maka terdapat pengaruh yang signifikan, dan jika signifikan $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Untuk pengujian signifikansi peneliti menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Kriteria pengujiannya adalah H_0 diterima jika signifikansi $> 0,05$ dan H_0 ditolak jika signifikansi $< 0,05$. Untuk menentukan t_{tabel} dengan cara tingkat signifikansi $0,05 : 2 = 0,025$ (uji dilakukan dua sisi) dengan df (*degree of freedom*) atau derajat kebebasan dicari dengan rumus $n-k$ atau $60-2=58$, sehingga diperoleh $t_{tabel} = 2.002$. Pada tabel 4.11 tersebut dapat dilihat bahwa signifikan perencanaan pajak memiliki t_{hitung} sebesar 4.989 sehingga $4.989 > 2.002$ dan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 ($0,010 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap manajemen laba.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengukur apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikan F dari hasil pengujian dengan nilai signifikan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.12

Tabel 4.12.
Hasil Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	32.452	3	15.647	9.771	.025 ^a
Residual	96.748	56	18.034		
Total	161.199	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS versi 25, tahun 2022)

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi pada tabel 4.12 dapat diketahui pada hasil analisis uji simultan, bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh 9.771. Untuk menentukan F_{tabel} dengan cara tingkat signifikansi 0,05 dengan df (*degree of freedom*) pembilang $df(n1)$ dan df (*degree of freedom*) penyebut $df(n2)$ dengan rumus $df(n1)=k-1$ ($4-1 = 3$) dan $df(n2) = n-k$ ($60-4 = 56$) sehingga maka didapatkan nilai F_{tabel} sebesar 2,77. Berdasarkan tabel 4.8 tersebut dapat dilihat bahwa signifikan pada uji $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($9,771 > 2,77$) dan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 ($0,025 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen (X_1), komite audit (X_2) dan perencanaan pajak (X_3), secara bersama-sama berpengaruh terhadap dan manajemen laba (Y) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2016-2020.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi hanyalah konsep statistik, menyatakan bahwa sebuah garis regresi adalah baik jika nilai R^2 tinggi dan sebaliknya bila nilai R^2 rendah maka garis regresi kurang baik.

Uji koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila angka koefisien determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.13

Tabel 4.13.
Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.632 ^a	.400	.359	1.48284	1.712

a. Predictors: (Constant), KI, KA, Perencanaan Pajak

b. Dependent Variable: Manajemen Laba

(Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS versi 25, tahun 2022)

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,359 atau sama dengan 35.9%, artinya, kontribusi pengaruh variabel independen yaitu komisaris independen (X_1), komite audit (X_2) dan perencanaan pajak (X_3), terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba (Y) adalah sebesar 35.9%. Sedangkan sisanya sebesar 64.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.3. Pembahasan

Hasil dari hipotesis penelitian telah diuraikan secara statistik dengan menggunakan SPSS versi 25, melalui uji secara parsial (uji statistik t), uji secara simultan (uji statistik F) dan secara uji determinasi. Hasil dari hipotesis penelitian disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.14.
Rekapitulasi Uji Hipotesis

No	Analisis	Hasil	Keterangan
1	Uji T	Variabel Komisar Independen $t_{hitung} -4,166 < t_{tabel} 2,002$ dan tingkat sig. $0,021 < 0,05$	H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.

No	Analisis	Hasil	Keterangan
		Variabel Komite Audit $t_{hitung} 2,532 > t_{tabel} 2,002$ dan tingkat sig. $0,133 > 0,05$	H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka koite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.
		Variabel Perencanaan Pajak $t_{hitung} 4,989 > t_{tabel} 2,002$ dan tingkat sig. $0,010 < 0,05$	H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.
2	Uji F	Komisaris Independen, Komite Audit, dan perencanaan pajak menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($9,771 > 2,76$) tingkat signifikansi kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$)	H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka Komisaris Independen, Komite Audit, dan perencanaan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.
3	Koefisien Determinasi	Kd = 35.9%	Kontribusi pengaruh variabel independen yaitu Komisaris Independen, Komite Audit, dan perencanaan pajak terhadap variabel dependen yaitu manajemen adalah sebesar 35.9%. Sedangkan sisanya sebesar 64.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.3.1. Pengaruh *Good Corporate Governance* yang diproyeksikan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil pengujian dapat dibuktikan bahwa hipotesis pertama ditolak dengan hasil penelitian bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Dalam penelitian ini, dengan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,021 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-4,166 < 2,002$) maka komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Selanjutnya dapat dilihat nilai koefisien sebesar -2.645 yang menunjukkan hubungan secara negatif, dimana semakin banyak jumlah komisaris independen maka akan semakin kecil tingkat praktek manajemen laba dan pengawasan yang dilakukan komisaris independen semakin berkualitas yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dibangun oleh penulis yang menyatakan bahwa semakin banyak komisaris independen maka akan semakin kecil tingkat praktek manajemen laba.

Hal ini sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa tugas Komisaris Independen adalah melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan publik maupun usaha emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi. Sehingga, dengan adanya Komisaris Independen dalam suatu perbankan syariah maka praktek manajemen laba akan menurun, karena telah ada badan pengawas yang mengawasi proses pembuatan laporan keuangan dan operasional perbankan syariah yang dilakukan oleh pihak manajemen agar tidak merugikan atau menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ernawati (2020) yang menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

4.3.2. Pengaruh *Good Corporate Governance* yang diproyeksikan Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil pengujian dapat dibuktikan bahwa hipotesis kedua diterima dengan hasil penelitian bahwa komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Dalam penelitian ini, dengan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,033 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,532 > 2,022$) maka komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Abdillah & Purwanto, (2019) menyatakan bahwa komite audit dapat mempengaruhi praktik manajemen laba yang terjadi pada perusahaan. Keberadaan komite audit pada perusahaan dapat mengurangi praktik manajemen laba yang merupakan akibat dari tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajer. Komite audit yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang keuangan serta akuntansi akan dapat melakukan pengawasan secara efektif, sehingga akan memperkecil kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen (Prasetyo, 2014). Meskipun demikian, kinerja komite audit menjadi lebih efektif jika para anggotanya memiliki independensi dalam menyatakan sikap dan pendapat (Pamudji & Trihartati, 2016).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Abdullah dan WanHussin, (2019) untuk dapat mengetahui hubungan antara komite audit dengan manajemen laba perusahaan menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

4.3.3. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini berdasarkan oleh uji t yang telah dilakukan dimana $T_{hitung} > T_{Tabel}$ ($4.989 > 2.002$) dengan signifikansi $0.010 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan dalam melakukan praktik manajemen laba begitu sebaliknya

Perusahaan akan melakukan perencanaan pajak dengan seefektif mungkin, tidak hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal, namun juga untuk memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Agar nilai saham mencapai nilai yang tinggi maka manajemen akan termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang baik, salah satunya yaitu dengan meminimalkan pembayaran pajak yang merupakan salah satu unsur pengurang laba yang akan dibagikan ke investor atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan, maka manajemen akan melakukan optimalisasi dalam meminimalkan pajak guna meningkatkan laba bersih perusahaan.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017), Aqmarina (2017) yang menyimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.

4.3.4. Pengaruh Good Corporate Governance dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui pada hasil analisis uji simultan, bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($9,771 > 2,77$) dan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 ($0,025 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen (X_1), komite audit (X_2) dan perencanaan pajak (X_3), secara bersama-sama berpengaruh terhadap dan manajemen laba (Y) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2016-2020.

Praktik manajemen laba tidak dapat dipisahkan dari adanya teori keagenan dan teori persinyalan. Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami corporate governance dimana masing-masing individu termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen (Sutino, 2016) Perilaku manajemen laba disaat ini dapat diminimalisir dengan pelaksanaan mekanisme good corporate governance (GCG). Salah satu tujuan dari GCG merupakan mengurangi terdapatnya kegiatan ataupun praktek manajemen laba yang kerap dilakukan manajer suatu perusahaan. Sehingga dengan adanya sistem pengawasan serta pengendalian sebagai prinsip dasar GCG munculah harapan - harapan menurunnya tindakan atau praktek manajemen laba pada penerapan GCG ini terutama implementasi dalam prinsip-prinsip yang ada (Melania, 2014).

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Yona, (2020) mengemukakan bahwa “good corporate governance (GCG) merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan”. Dewan komisaris untuk diproksikan karena pihak yang berperan penting dalam menyediakan laporan keuangan perusahaan yang reliable, artinya dengan adanya dewan komisaris di dalam perusahaan akan menjamin terciptanya laporan keuangan yang dapat di andalkan. Keberadaan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa yang dilakukan oleh manajer (Agoes, 2011).

Komite audit berperan penting dalam kualitas dan kredibilitas laporan keuangan, karena mereka bertindak sebagai bagian dari mekanisme good corporate

governance untuk meningkatkan operasional dan keuntungan ekonomi perusahaan. Komite audit merupakan mekanisme penting dalam tata kelola perusahaan (Mughni,2015).

Perencanaan pajak adalah metode yang digunakan oleh manajemen perusahaan (wajib pajak) dalam melakukan manajemen pajak penghasilan dengan catatan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan pajak (tax planning) merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pajak berdampak langsung terhadap pengurangan keuntungan suatu perusahaan. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah harus dilaksanakan dengan tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan tarif pajak agar pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan antara masyarakat dan pemerintah. Perencanaan pajak merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen laba.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Murniati (2019) yang menyimpulkan bahwa *good corporate governance* dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil pengujian dapat dibuktikan bahwa hipotesis pertama ditolak dengan hasil penelitian bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Dalam penelitian ini, dengan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,021 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-4,166 < 2,002$) maka komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.
2. Hasil pengujian dapat dibuktikan bahwa hipotesis kedua diterima dengan hasil penelitian bahwa komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Dalam penelitian ini, dengan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,033 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,532 > 2,022$) maka komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
3. Hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini berdasarkan oleh uji t yang telah dilakukan dimana $T_{hitung} > T_{Tabel}$ ($4.989 > 2.002$) dengan signifikansi $0.010 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan dalam melakukan praktik manajemen laba begitu sebaliknya.
4. Hasil perhitungan, dapat diketahui pada hasil analisis uji simultan, bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($9,771 > 2,77$) dan tingkat signifikansi kurang dari $0,05$ ($0,025 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen (X_1), komite audit (X_2) dan perencanaan pajak (X_3), secara bersama-sama berpengaruh terhadap dan manajemen laba (Y) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2016-2020.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian, maka penulis dapat menguraikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Investor

Bagi Investor, sebelum melakukan investasi di suatu perusahaan, investor harus teliti dalam melihat informasi aktual yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan terkait dengan praktik manajemen laba guna mengurangi kerugian yang akan ditanggung investor.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya Sebaiknya melakukan pemilihan dan penambahan variabel dari faktor-faktor internal maupun eksternal perusahaan dengan tahun penelitian yang terbaru juga, hal ini bertujuan agar hasil penelitiannya pun dapat menggambarkan secara umum dan luas, serta dapat memberikan gambaran terkini mengenai perusahaan. Selain itu peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan dalam industri yang berbeda agar dapat menjadi pembandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S. Y., Susilawati, R. E., & Purwanto, N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Pada Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014). *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 1.
- Abdullah, N. M., & Wan-Hussin, W. N. (2019). Related party transactions, audit committees and real earnings management: The moderating impact of family ownership. *Advanced Science Letters*, 21(6), 2033–2037. HYPERLINK "https://doi.org/10.1166/asl.2015.6195" <https://doi.org/10.1166/asl.2015.6195>
- Achyani, F., & Lestari, S. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 79.
- Amelia, W., & Hernawati, E. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. *NeO-Bis*, 68.
- Ayu, P. P., & Septiani, T. (2017). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, dan KAP Terhadap Fee Audit Eksternal. *Jurnal Akuntansi*, 5-6.
- Banjarnahor, E. (2020, Agustus 15). *Manipulasi Laporan Keuangan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)*. Retrieved from Wordpress.com: <https://erlianabanjarnahor19.wordpress.com>
- Carisa, D. F. (2019). Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (studi empiris terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017). *Skripsi*.
- DeAngelo, E.L. (2015). Accounting Numbers as Market Valuation Substitutes: A Study of Management Buyouts of Public Stockholders. *The Accounting Review*, LXI, (3), 400- 422
- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Embu, W. S. (2019). *Industri Makanan Dan Minuman Jadi Andalan Tekan Defisit Neraca Dagang*. Jakarta: Liputan6.com.
- Ernawati, L. (2020). Pengaruh Komisaris Independen dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Laba Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam E-ISSN: 2715-9477, P-ISSN: 2751-954X Volume 01 Issue 01, 21 Januari 2020*
- Fadillah, A. R. (2017). Analisa Pengaruh Dewan Komisaris Independen, kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Instutional Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Terdaftar Di LQ45. *Jurnal Akuntansi*, 40.
- Febriyanti, F. A. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013. 3.

- Ferial, & Dkk. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 148.
- Franita, R. (2018). *Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan Studi Untuk Persahaan Telekomunikasi*. Medan : Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Jakarta: Universitas Diponegoro.
- Herlambang, S. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. 17.
- Intan, Puspita Sari. (2018). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Pada Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.1*, 94-104
- Lestari, D. S., Kurnia, I., & Yuniati. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 135.
- Lim, F. H., & Hutomo, Y. (2016). Perbedaan Manajemen Laba Berdasarkan Managerial Tenure. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 16.
- Maharani, N. (2017). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada BNI Syariah Cabang Bengkulu.
- Narwanti, S. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Istana Media.
- Natsir. (2020). Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Auditor Terhadap Manajemen Laba Dengan Kepemilikan Keluarga Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-JA e-Jurnal Akuntansi e-ISSN 2302-8556. Vol. 30 No. 1 Denpasar, Januari 2020 Hal. 114-129*
- Negara, A. G., & Suputra, I. D. (2017). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2060.
- Nuryan, I. (2016). Strategy Development and Implementation Of Good Corporate Governance (GCG) On BUMN and BUMD In Indonesia. *Jurnal AdBispreneur*, 146.
- Oktaryani, G. A., Abdul Mannan, S. S., & Ardana Putra, I. N. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (Studi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)*, 89.
- Oktaviani, & Dkk. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia). *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)*, 89.

- Pamudji, S., & Trihartati, A. (2016). Pengaruh Independensi Dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(1), 21–29. HYPERLINK "https://doi.org/10.15294/jda.v2i1.1924"
<https://doi.org/10.15294/jda.v2i1.1924>
- Panjaitan, D. K., & Muslih, M. (2019). Manajemen Laba: Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial dan Kompensasi Bonus. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 5.
- Panjaitan, D. K., & Muslih, M. (2019). Manajemen Laba: Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial dan Kompensasi Bonus. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 5.
- Parsaoan, D. (2020, Agustus 15). Retrieved from wordpress.com:
<https://davidparsaoran.wordpress.com>
- Perdana, A. A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Lavarage, dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di PT Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia Dari Tahun 2015-2017). *Jurnal Ekonomi Sakti (JES)*, 3.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Prasetyo, A. B. (2014). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 11(1), 1–24. HYPERLINK "https://doi.org/10.14710/jaa.v11i1.9696"
<https://doi.org/10.14710/jaa.v11i1.9696>
- Mardiasmo, M. A. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rimardhani, & Dkk. (2016). PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2016). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 169.
- Rustam, A., Mira, Azwar, & Sartika, I. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Oajak Penghasilan Badan Pada PT. Bimi Sarana Beton. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 60.
- Sartika, I. (2019). Penengaruh Kualitas Audit, Konsentrasi Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba, Komite Audit Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. 2.
- Scott, W. R. (2015). *Reading From Financial Accounting Theory: Customized for AC3103*. Singapura: Pearson Education South Asia Pte Limited.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Indeks.
- Susanto, C. M., & Ardini, L. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 3.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governande*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto, K. D., & Supramono, S. (2017). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2)
- Suyono, Eko. (2017). “Berbagai Model Pengukuran Earnings Management.” *Sustainable Competitive Advantage* 7(7): 303–24.
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Mndeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utami, K. (2020). ANALISIS PRAKTIK MANAJEMEN LABA PADA LAPORAN KEUANGAN BANK UMUM SYARIAHMENGGUNAKAN MODIVIED JONES MODEL. *Skripsi*, 21.
- Wardani, D. K., & Santi, D. K. (2018). Pengaruh Tax Planning, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi*, 12.
- Widasari, T., & Isgiyarta, J. (2017). Pengaruh Keahlian Komite Audit Dan Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Dengan Audit Eksternal Sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 10.
- Yunietha, & Palupi, A. (2017). Pengaruh Coeporate Governance dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Publik Non Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 294.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Permana, Adi. (2021). Penyebab Naik Turun Industri Hulu Migas Indonesia. Diakses dalam HYPERLINK "<https://www.itb.ac.id/berita/detail/58141/penyebab-naik-turun-industri-hulu-migas-indonesia>"
<https://www.itb.ac.id/berita/detail/58141/penyebab-naik-turun-industri-hulu-migas-indonesia>

Lampiran 1

Tabulasi Data Dewan Komisaris (X₁)

No	Kode	Tahun	Komisaris Indepeneden	Komisaris	%
1	ADES	2016	1	2	50
		2017	1	2	50
		2018	1	2	50
		2019	1	2	50
		2020	1	2	50
2	DLTE	2016	2	4	50
		2017	2	4	50
		2018	2	4	50
		2019	2	4	50
		2020	2	4	50
3	ICBP	2016	3	6	50
		2017	3	6	50
		2018	3	6	50
		2019	3	6	50
		2020	3	6	50
4	INDF	2016	3	8	38
		2017	3	8	38
		2018	3	8	38
		2019	3	8	38
		2020	3	8	38
5	MYOR	2016	2	5	40
		2017	2	5	40
		2018	2	5	40
		2019	2	5	40
		2020	2	5	40
6	MLBI	2016	3	7	43
		2017	3	7	43
		2018	3	7	43
		2019	3	7	43
		2020	3	7	43
7	ROTI	2016	1	3	33
		2017	1	3	33
		2018	1	3	33
		2019	1	3	33
		2020	1	3	33
8	SKBM	2016	1	3	33
		2017	1	3	33
		2018	1	3	33
		2019	1	3	33

No	Kode	Tahun	Komisaris Indepeneden	Komisaris	%
		2020	1	3	33
9	ULTJ	2016	2	4	50
		2017	2	4	50
		2018	2	4	50
		2019	2	4	50
		2020	2	4	50
		2020	2	4	50
10	CEKA	2016	1	3	33
		2017	1	3	33
		2018	1	3	33
		2019	1	3	33
		2020	1	3	33
11	BUDI	2016	1	3	33
		2017	1	3	33
		2018	1	3	33
		2019	1	3	33
		2020	1	3	33
12	STTP	2016	1	2	50
		2017	1	2	50
		2018	1	2	50
		2019	1	2	50
		2020	1	2	50

Lampiran 2

Tabulasi Komite Audit (X₂)

No	Kode	Tahun	Jumlah Komite Audit
1	ADES	2016	3
		2017	3
		2018	3
		2019	3
		2020	3
2	DLTA	2016	3
		2017	3
		2018	3
		2019	3
		2020	3
3	ICBP	2016	3
		2017	3
		2018	3
		2019	3
		2020	3
4	INDF	2016	3
		2017	3
		2018	3
		2019	3
		2020	3
5	MYOR	2016	3
		2017	3
		2018	3
		2019	3
		2020	3
6	MLBI	2016	3
		2017	3
		2018	3
		2019	3
		2020	3
7	ROTI	2016	3
		2017	3
		2018	3
		2019	3
		2020	3
8	SKBM	2016	3
		2017	3
		2018	3
		2019	3
		2020	3

No	Kode	Tahun	Jumlah Komite Audit
9	ULTJ	2016	3
		2017	3
		2018	3
		2019	3
		2020	3
10	CEKA	2016	3
		2017	3
		2018	3
		2019	3
		2020	3
11	BUDI	2016	3
		2017	3
		2018	3
		2019	3
		2020	3
12	STTP	2016	3
		2017	3
		2018	3
		2019	3
		2020	3

Lampiran 3

Tabulasi Data Perencanaan Pajak (X₃)

Disajikan dalam rupiah penuh

No	Kode	Tahun	Laba Bersih	Laba Sebelum Pajak	TRR
1	ADES	2016	55,951,000,000	61,636,000,000	90.8
		2017	38,242,000,000	51,095,000,000	74.8
		2018	52,958,000,000	70,060,000,000	75.6
		2019	83,885,000,000	110,179,000,000	76.1
		2020	135,789,000,000	167,919,000,000	80.9
2	DLTE	2016	254,509,268,000	327,047,654,000	77.8
		2017	279,772,635,000	369,012,218,000	75.8
		2018	338,129,985,000	441,248,118,000	76.6
		2019	317,815,177,000	412,437,215,000	77.1
		2020	123,465,762,000	164,704,480,000	75.0
3	ICBP	2016	3,631,301,000,000	4,989,254,000,000	72.8
		2017	3,543,173,000,000	5,206,561,000,000	68.1
		2018	4,658,781,000,000	6,446,785,000,000	72.3
		2019	5,360,029,000,000	7,436,972,000,000	72.1
		2020	7,418,574,000,000	9,958,647,000,000	74.5
4	INDF	2016	5,266,906,000,000	7,385,228,000,000	71.3
		2017	5,145,063,000,000	7,594,822,000,000	67.7
		2018	4,961,851,000,000	7,446,966,000,000	66.6
		2019	5,902,729,000,000	8,749,397,000,000	67.5
		2020	8,752,066,000,000	12,426,334,000,000	70.4
5	MYOR	2016	1,388,676,127,665	1,845,683,269,238	75.2
		2017	1,630,953,830,893	2,186,884,603,474	74.6
		2018	1,760,434,280,304	2,381,942,198,855	73.9
		2019	2,039,404,206,764	2,704,466,581,011	75.4
		2020	2,098,168,514,645	2,683,890,279,936	78.2
6	MLBI	2016	982,189,000,000	1,320,186,000,000	74.4
		2017	1,322,067,000,000	1,780,020,000,000	74.3
		2018	1,224,807,000,000	1,671,912,000,000	73.3
		2019	1,206,059,000,000	1,626,612,000,000	74.1
		2020	285,617,000,000	396,470,000,000	72.0
7	ROTI	2016	279,777,368,831	369,416,841,698	75.7
		2017	135,364,021,139	186,147,334,530	72.7
		2018	127,171,436,363	186,936,324,915	68.0
		2019	236,517,557,420	347,098,820,613	68.1
		2020	168,610,282,478	160,357,537,779	105.1
8	SKBM	2016	22,545,456,050	30,809,950,308	73.2
		2017	25,880,464,791	31,761,022,154	81.5
		2018	15,954,632,472	20,887,453,647	76.4
		2019	957,169,058	5,163,201,735	18.5

No	Kode	Tahun	Laba Bersih	Laba Sebelum Pajak	TRR
		2020	5,415,741,808	13,568,762,041	39.9
9	ULTJ	2016	709,826,000,000	932,482,782,652	76.1
		2017	711,681,000,000	1,035,192,000,000	68.7
		2018	701,607,000,000	949,018,000,000	73.9
		2019	1,035,865,000,000	1,375,359,000,000	75.3
		2020	1,109,666,000,000	1,421,517,000,000	78.1
10	CEKA	2016	249,697,013,626	285,827,837,455	87.4
		2017	107,420,886,839	143,195,939,366	75.0
		2018	92,649,656,775	123,394,812,359	75.1
		2019	215,459,200,242	285,132,249,695	75.6
		2020	181,812,593,992	232,864,791,126	78.1
11	BUDI	2016	38,624,000,000	52,832,000,000	73.1
		2017	45,691,000,000	61,016,000,000	74.9
		2018	50,467,000,000	71,781,000,000	70.3
		2019	64,021,000,000	83,905,000,000	76.3
		2020	67,093,000,000	69,312,000,000	96.8
12	STTP	2016	174,176,717,866	217,746,308,540	80.0
		2017	216,027,079,834	288,545,819,603	74.9
		2018	255,088,886,019	324,694,650,175	78.6
		2019	482,590,522,840	607,043,293,422	79.5
		2020	628,628,879,549	773,607,195,121	81.3

Lampiran 4

Tabulasi Data Manajemen Laba (Y)

Disajikan dalam rupiah penuh

Kode	Tahun	Laba Bersih	Laba Bersih Tahun Sebelumnya		Saham Beredar	Harga Saham	MVE	SEC
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8=(6*7)	9=5/8
ADES	2016	55,951,000,000	32,839,000,000	23,112,000,000	589,896,800	1,000	589,896,800,000	3.92
	2017	38,242,000,000	55,951,000,000	(17,709,000,000)	589,896,800	885	522,058,668,000	(3.39)
	2018	52,958,000,000	38,242,000,000	14,716,000,000	589,896,800	920	542,705,056,000	2.71
	2019	83,885,000,000	52,958,000,000	30,927,000,000	589,896,800	1,045	616,442,156,000	5.02
	2020	135,789,000,000	83,885,000,000	51,904,000,000	589,896,800	1,510	890,744,168,000	5.83
DLTA	2016	254,509,268,000	192,045,199,000	62,464,069,000	800,659,050,000	5,000	4,003,295,250,000,000	0.00
	2017	279,772,635,000	254,509,268,000	25,263,367,000	800,659,050,000	4,590	3,675,025,039,500,000	0.00
	2018	338,129,985,000	279,772,635,000	58,357,350,000	800,659,050,000	5,450	4,363,591,822,500,000	0.00
	2019	317,815,177,000	338,129,985,000	(20,314,808,000)	800,659,050,000	6,750	5,404,448,587,500,000	(0.00)
	2020	123,465,762,000	317,815,177,000	(194,349,415,000)	800,659,050,000	4,230	3,386,787,781,500,000	(0.01)
ICBP	2016	3,631,301,000,000	2,923,148,000,000	708,153,000,000	11,661,908,000	8,575	100,000,861,100,000	0.71
	2017	3,543,173,000,000	3,631,301,000,000	(88,128,000,000)	11,661,908,000	8,900	103,790,981,200,000	(0.08)
	2018	4,658,781,000,000	3,543,173,000,000	1,115,608,000,000	11,661,908,000	10,450	121,866,938,600,000	0.92
	2019	5,360,029,000,000	4,658,781,000,000	701,248,000,000	11,661,908,000	11,225	130,904,917,300,000	0.54
	2020	7,418,574,000,000	5,360,029,000,000	2,058,545,000,000	11,661,908,000	9,300	108,455,744,400,000	1.90
INDF	2016	5,266,906,000,000	3,709,501,000,000	1,557,405,000,000	8,780,426,500	7,925	69,584,880,012,500	2.24
	2017	5,145,063,000,000	5,266,906,000,000	(121,843,000,000)	8,780,426,500	7625	66,950,752,062,500	(0.18)
	2018	4,961,851,000,000	5,145,063,000,000	(183,212,000,000)	8,780,426,500	7450	65,414,177,425,000	(0.28)

Kode	Tahun	Laba Bersih	Laba Bersih Tahun Sebelumnya		Saham Beredar	Harga Saham	MVE	SEC
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8=(6*7)	9=5/8
	2019	5,902,729,000,000	4,961,851,000,000	940,878,000,000	8,780,426,500	7900	69,365,369,350,000	1.36
	2020	8,752,066,000,000	5,902,729,000,000	2,849,337,000,000	8,780,426,500	6825	59,926,410,862,500	4.75
MYOR	2016	1,388,676,127,665	1,266,519,320,600	122,156,807,065	22,358,699,725	1645	36,780,061,047,625	0.33
	2017	1,630,953,830,893	1,388,676,127,665	242,277,703,228	22,358,699,725	2270	50,754,248,375,750	0.48
	2018	1,760,434,280,304	1,630,953,830,893	129,480,449,411	22,358,699,725	2620	58,579,793,279,500	0.22
	2019	2,039,404,206,764	1,760,434,280,304	278,969,926,460	22,358,699,725	2050	45,835,334,436,250	0.61
	2020	2,098,168,514,645	2,039,404,206,764	58,764,307,881	22,358,699,725	2910	65,063,816,199,750	0.09
MLBI	2016	982,189,000,000	496,909,000,000	485,280,000,000	2,107,000,000	11750	24,757,250,000,000	1.96
	2017	1,322,067,000,000	982,189,000,000	339,878,000,000	2,107,000,000	13675	28,813,225,000,000	1.18
	2018	1,224,807,000,000	1,322,067,000,000	(97,260,000,000)	2,107,000,000	16000	33,712,000,000,000	(0.29)
	2019	1,206,059,000,000	1,224,807,000,000	(18,748,000,000)	2,107,000,000	15400	32,447,800,000,000	(0.06)
	2020	285,617,000,000	1,206,059,000,000	(920,442,000,000)	2,107,000,000	9600	20,227,200,000,000	(4.55)
ROTI	2016	279,777,368,831	270,538,700,440	9,238,668,391	6,186,488,888	1600	9,898,382,220,800	0.09
	2017	135,364,021,139	279,777,368,831	(144,413,347,692)	6,186,488,888	1275	7,887,773,332,200	(1.83)
	2018	127,171,436,363	135,364,021,139	(8,192,584,776)	6,186,488,888	1200	7,423,786,665,600	(0.11)
	2019	236,517,557,420	127,171,436,363	109,346,121,057	6,186,488,888	1300	8,042,435,554,400	1.36
	2020	168,610,282,478	236,517,557,420	(67,907,274,942)	6,186,488,888	1330	8,228,030,221,040	(0.83)
SKBM	2016	22,545,456,050	40,150,568,621	(17,605,112,571)	1,726,003,217	640	1,104,642,058,880	(1.59)
	2017	25,880,464,791	22,545,456,050	3,335,008,741	1,726,003,217	740	1,277,242,380,580	0.26
	2018	15,954,632,472	25,880,464,791	(9,925,832,319)	1,726,003,217	510	880,261,640,670	(1.13)
	2019	957,169,058	15,954,632,472	(14,997,463,414)	1,726,003,217	402	693,853,293,234	(2.16)
	2020	5,415,741,808	957,169,058	4,458,572,750	1,726,003,217	322	555,773,035,874	0.80
ULTJ	2016	709,826,000,000	523,100,000,000	186,726,000,000	2,888,382,000	4570	13,199,905,740,000	1.41

Kode	Tahun	Laba Bersih	Laba Bersih Tahun Sebelumnya		Saham Beredar	Harga Saham	MVE	SEC
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8=(6*7)	9=5/8
	2017	711,681,000,000	709,826,000,000	1,855,000,000	2,888,382,000	1290	3,726,012,780,000	0.05
	2018	701,607,000,000	711,681,000,000	(10,074,000,000)	2,888,382,000	1350	3,899,315,700,000	(0.26)
	2019	1,035,865,000,000	701,607,000,000	334,258,000,000	2,888,382,000	1705	4,924,691,310,000	6.79
	2020	1,109,666,000,000	1,035,865,000,000	73,801,000,000	2,888,382,000	1660	4,794,714,120,000	1.54
CEKA	2016	249,697,013,626	106,549,446,980	143,147,566,646	595,000,000	1350	803,250,000,000	17.82
	2017	107,420,886,839	249,697,013,626	(142,276,126,787)	595,000,000	1290	767,550,000,000	(18.54)
	2018	92,649,656,775	107,420,886,839	(14,771,230,064)	595,000,000	1375	818,125,000,000	(1.81)
	2019	215,459,200,242	92,649,656,775	122,809,543,467	595,000,000	1685	1,002,575,000,000	12.25
	2020	181,812,593,992	215,459,200,242	(33,646,606,250)	595,000,000	1820	1,082,900,000,000	(3.11)
BUDI	2016	38,624,000,000	21,072,000,000	17,552,000,000	4,498,997,362	87	391,412,770,494	4.48
	2017	45,691,000,000	38,624,000,000	7,067,000,000	4,498,997,362	94	422,905,752,028	1.67
	2018	50,467,000,000	45,691,000,000	4,776,000,000	4,498,997,362	96	431,903,746,752	1.11
	2019	64,021,000,000	50,467,000,000	13,554,000,000	4,498,997,362	105	472,394,723,010	2.87
	2020	67,093,000,000	64,021,000,000	3,072,000,000	4,498,997,362	103	463,396,728,286	0.66
STTP	2016	174,176,717,866	185,705,201,171	(11,528,483,305)	1,310,000,000	3090	4,047,900,000,000	(0.28)
	2017	216,027,079,834	174,176,717,866	41,850,361,968	1,310,000,000	4360	5,711,600,000,000	0.73
	2018	255,088,886,019	216,027,079,834	39,061,806,185	1,310,000,000	4530	5,934,300,000,000	0.66
	2019	482,590,522,840	255,088,886,019	227,501,636,821	1,310,000,000	3100	4,061,000,000,000	5.60
	2020	628,628,879,549	482,590,522,840	146,038,356,709	1,310,000,000	9500	12,445,000,000,000	1.17